

PETUNJUK PENGISIAN *CODING SHEET*
ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS
DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)
DI SKH KOMPAS

- 1) Kefaktualan berita : **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Fakta sosiologis : apabila berita yang dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya/nyata tanpa memuat unsur opini.
 2. Fakta psikologis : apabila berita yang dibuat berdasarkan atas opini seseorang mengenai sebuah peristiwa/fakta (interpretasi subjektif) yang berupa pernyataan, pendapat dan penilaian.
- 2) Narasumber berita yang digunakan : **(Boleh pilih lebih dari satu)**
 1. Pemerintah
 2. TNI/Polri
 3. Intelektual
 4. LSM/Ormas
 5. Masyarakat
 6. Pelaku
 7. Politisi
 8. Lembaga Survey
- 3) Akurasi, merupakan kegiatan verifikasi terhadap fakata. Dapat diketahui dengan ada tidaknya cek dan ricek yang dilakukan oleh wartawan dalam menyajikan sebuah berita. **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Ada (apabila berita mencantumkan nama narasumber serta jabatannya, tempat, dan waktu dengan jelas, maupun informasi lainnya yang ditulis dengan benar tanpa adanya kesalahan)
 2. Tidak ada (apabila berita tidak mencantumkan nama narasumber tempat, dan waktu dengan jelas, maupun informasi lainnya yang ditulis dengan benar tanpa adanya kesalahan).

- 4) Kelengkapan berita, sebuah berita dikatakan lengkap apabila isi berita memenuhi semua unsur 5W+1H (*what, where, when, who, why* dan *how*) tanpa terkecuali. **(pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Lengkap (apabila berita memuat lengkap unsur berita 5W+1H tanpa kurang satupun)
 2. Tidak lengkap (apabila berita tidak lengkap memuat unsur berita 5W+1H).
- 5) Relevan, berita yang relevan dapat diketahui dari nilai berita yang terkandung didalamnya. Berita dikatakan relevan apabila disajikan sesuai dengan standar layak berita *seperti significane, timeliness, magnitude, proximity, dan prominence*. **(pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Relevan (apabila berita yang disajikan memuat lebih dari 3-5 nilai berita)
 2. Tidak relevan (apabila berita hanya memuat 1-2 nilai berita)
- 6) *Equal or proportional acces* (menampilkan pandangan yang berasal dari berbagai pihak), berita dikatakan berimbang apabila terdapat pemberian porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang bertentangan dalam peristiwa tersebut. **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Liputan satu sisi (ketika dalam sebuah berita hanya menampilkan pendapat yang berasal dari satu narasumber saja).
 2. Liputan dua sisi (ketika dalam sebuah berita menampilkan pendapat yang berasal dari dua narasumber yang berlainan).
 3. Liputan multi sisi (ketika dalam sebuah berita menampilkan beragam pandangan yang berasal dari berbagai sumber).
- 7) *Even handed evaluation*, sebuah berita dapat dikatakan berimbang apabila isi berita tidak memihak. **(Pilih salah satu yang sesuai)**
 1. Positif /pro Ahok (apabila berita cenderung memberitakan Ahok secara positif)
 2. Negatif /tidak pro Ahok (apabila isi berita cenderung memberitakan Ahok secara negative).
 3. Netral/tidak memihak (apabila isi berita tidak memihak kepada siapa pun).
- 8) *Non sensational*, berita dikatakan netral apabila terdapat kesesuaian judul dengan isi berita). **(Pilih salah satu yang sesuai)**

1. *Non sensational*(apabila fakta ditulis secara apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau di dramatisasi, terdapat kesesuaian antara judul dengan isi berita).
 2. *Sensational* (apabila tidak adanya kesesuaian antara judul dengan isi berita, berita dan isi berita memuat unsure dramatisasi atau dilebih-lebihkan).
- 9) *Non evaluative* (tidak adanya pencampuran fakta dan opini wartawan) **(Pilih salah satu yang sesuai)**
1. *Non evaluative* (apabila wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini/ pendapat pribadinya yang mengarah kepada penilaian benar maupun salahnya salah satu pihak).
 2. *Evaluative* (apabila wartawan mencampurkan fakta dan opini/ pendapat pribadinya yang mengarah kepada penilaian benar maupun salahnya salah satu pihak).

CODING SHEET

ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)

DI SKH KOMPAS

Tanggal Pengisian : 4 September 2017

Nama : DWI PURNANINGSIH

Hal 3/3

No	Unit Penelitian	Nomor Berita											
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Kefaktualan	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2	Narasumber	1,7	4, 2	7(2), 2(2), 3(2)	7, 1(2), 2(2), 4	4(2), 3	1,7, 4(4), 3	1, 3(2)	2(2), 4	2(2)	7	1(3), 2(2), 4(3), 7	1(2), 4, 2(4), 7
3	Keakuratan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kelengkapan	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
5	Relevansi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	<i>Equal or Proportional acces</i>	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	3	3
7	<i>Even Handed Evaluation</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	<i>Non Sensational</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	<i>Non Evaluatif</i>	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

CODING SHEET

ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)

DI SKH KOMPAS

Tanggal Pengisian : 15 September 2017

Nama : JAUHAROTUL ULUMIYAH

Hal 1/3

No	Unit Penelitian	Nomor Berita													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kefaktualan	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
2	Narasumber	1(2),8, 2, 4,7	4(2),1	2(2),6	1(3), 4(2),2	1(4), 2(3), 7(4)	4 (2)	1(2), 4(3), 2(2)	5(7)	2(3), 5,1,4	2(3), 4(4), 1, 7	1(3), 2(3), 4	6, 4, 2(2)	2, 1(2), 4, 7	2, 4(2)
3	Keakuratan	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
4	Kelengkapan	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Relevansi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	<i>Equal or Proportional acces</i>	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	2
7	<i>Even Handed Evaluation</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	<i>Non Sensational</i>	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1
9	<i>Non Evaluatif</i>	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

CODING SHEET

ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)

DI SKH KOMPAS

Tanggal Pengisian : 15 September 2017

Nama : JAUHAROTUL ULUMIYAH

Hal 3/3

No	Unit Penelitian	Nomor Berita											
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Kefaktualan	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
2	Narasumber	1,7	4, 2	7(2), 2(3), 3(2)	7, 1(2), 2, 4(2)	4(2), 3	1(2), 7(2), 4(3)	1, 3(2)	2(2), 4	2(2)	7	1(3),2, 4(3),	1(2), 4, 2(4), 7
3	Keakuratan	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Kelengkapan	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
5	Relevansi	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
6	<i>Equal or Proportional acces</i>	2	2	3	3	3	3	2	2	1	1	3	3
7	<i>Even Handed Evaluation</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	<i>Non Sensational</i>	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	<i>Non Evaluatif</i>	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Ancaman Pidana bagi Kampanye SARA

Penyelenggara Diminta Netral dan Bekerja Profesional

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta bakal memidanakan pelanggar larangan kampanye yang menghina suku, agama, ras, dan antar-golongan atau SARA. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggar ketentuan itu diancam hukuman penjara dan denda.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti, Jumat (7/10), menyatakan, sesuai Pasal 69 (b) UU No 10/2016, materi kampanye dilarang menghina SARA. Sanksi pelanggaran aturan itu ada pada Pasal 187. Pelanggar diancam hukuman 3-18 bulan penjara atau denda Rp 600.000-Rp 6 juta.

Namun, lanjut Mimah, sepanjang pasangan calon belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu belum bisa mengenakan sanksi pidana.

Secara terpisah, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno meminta seluruh penyelenggara, termasuk petugas di tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun tempat pemungutan suara, untuk netral, berintegritas, dan bekerja profesional. Tak hanya bertindak sesuai aturan, para pelaksana dituntut memenuhi etika untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang bermutu, termasuk bebas isu SARA.

Sementara itu, dalam diskusi analisis hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, anggota tim peneliti LSI, Ardian Sopa, menyampaikan, bakal calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama hanya dapat mempertahankan dan meningkatkan dukungan Menurut Ketua Kotak Adja, Muanas Alaidid, rekaman video Basuki yang asli telah dipotong dan ditambahi kalimat yang provokatif.

Sementara itu, bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan melanjutkan kunjungan ke sejumlah wilayah untuk mengumpulkan dukungan suara pemilih. Jumat kemarin, Anies *blusukan* dan menandatangani kontrak politik dengan warga Guji Baru di bantaran Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam kunjungan itu, Ketua Pengurus Anak Cabang PDI-P Kebon Jeruk M Ranto menyatakan, sebagian besar pendukung PDI-P di wilayahnya memutuskan mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno.

selama dia dapat menjaga dirinya dari isu-isu primordialisme, seperti agama.

Menurut Ardian, di mata responden, Basuki masih dipandang bersih dari korupsi, termasuk dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. "Pilkada ini, kan, sangat terkait dengan citra. Dengan keputusan pemilih yang masih dipengaruhi sentimen agama, **sebaiknya** Basuki menjauhi pernyataan yang bisa menjeratnya dalam blunder masalah agama," tuturnya.

Saling melaporkan

Dalam perkembangan lain, tiga kelompok berbeda saling melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait rekaman video Basuki saat berpidato di Kepulauan Seribu, 28 September. Laporan bahkan juga dibuat ke Polda Sumatera Selatan.

Di Polda Metro Jaya, Forum Anti Penistaan Agama dan Angkatan Muda Muhammadiyah, yang datang secara terpisah, melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan Basuki dalam pidatonya itu. Sementara di Sumatera Selatan, menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Djoko Prastowo, Jumat, Basuki dilaporkan oleh MUI Sumsel.

Namun, secara terpisah, para advokat yang tergabung dalam Komite Advokat Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) balik melaporkan akun Facebook dengan nama SY, yang pertama kali mengunggah video pidato Basuki yang telah diedit.

"Kami sejak awal meminta PDI-P mencalonkan Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) sebagai gubernur DKI. Namun, parpol malah mengusung Basuki. Kami kecewa dan memutuskan mendukung Sandiaga Uno," ungkapnya.

(MKN/MDN/WAD/DEA/RAM)

Kilas Metro: Kedepankan Persaingan Ide, Bukan Isu Primordial

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berharap, Pilkada DKI 2017 menjadi ajang persaingan ide. "Seharusnya, dari sekarang, pertarungan yang lahir adalah perang ide dan solusi bagi Jakarta. Bukan dengan isu primordial seperti saat ini," katanya dalam diskusi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (13/10). Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta Syafii Mufid menyampaikan, menciptakan pilkada yang berkualitas merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Peringkat kerukunan beragama Jakarta itu belum terlalu baik. Masih di bawah lima besar. Seharusnya momentum pilkada menjadi sarana berdemokrasi, juga membangun kerukunan beragama. Mari hindari pernyataan yang stereotip dan primordial," kata Syafii. Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, menambahkan, saat ini ada tiga laporan pelanggaran pilkada dan semuanya terkait penistaan agama. Bawaslu belum memproses laporan itu karena belum ada penetapan calon. **(JAL)**

DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Basuki Beri Klarifikasi ke Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklarifikasi pernyataannya terkait dugaan penistaan agama ke penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Senin (24/10). Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menegaskan, keterangan Basuki tidak bersifat *pro justitia* sehingga penyidik merencanakan untuk meminta keterangan Basuki terkait penyelidikan kasus tersebut beberapa waktu mendatang.

"Saya datang untuk memberikan klarifikasi. Harapannya, penyidik kepolisian memiliki bahan untuk penyelidikan kasus itu (dugaan penistaan agama)," ujar Basuki di gedung sementara Bareskrim Polri, kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.

Basuki mendatangi Gedung Bareskrim pukul 10.20. Ia memberikan keterangan di lantai 2, tepatnya di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Sekitar pukul 12.45, Basuki selesai memberikan keterangan kepada penyidik.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh pihak. Alhasil, Basuki tidak pernah bermaksud menyinggung ulama melalui pernyataannya di Kepulauan Seribu, September.

"Saya tidak mungkin menistakan Al Quran karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kitab sucinya, tidak ada niat saya untuk menyinggung ulama. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ujarnya.

Hal itu diakui Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto. Agus menyatakan, penyidik bersifat mendengar sejumlah klarifikasi Basuki atas sejumlah pelaporan terkait pertemuan Basuki dengan warga di Kepulauan Seribu. "Beliau minta waktu kepada penyidik untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilaporkan sejumlah

pihak tentang kejadian di Kepulauan Seribu. Intinya, beliau menjelaskan dan mengklarifikasi kejadian sebenarnya di sana," ujar Agus.

Ari menambahkan, penyidik Bareskrim belum memanggil Basuki untuk diperiksa sebagai saksi terkait pernyataannya yang diduga menistakan agama. Penyidik hanya mendengar klarifikasi Basuki sehingga keterangan itu tidak bersifat *pro justitia* dan belum dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Kegiatan kami (penyidikan kasus penistaan agama) masih melengkapi bukti dan saksi-saksi. Kemungkinan beliau (Basuki) akan dipanggil untuk dimintai keterangan," kata Ari.

Ari memastikan penyelidikan kasus itu tetap berlangsung sebagai langkah Bareskrim memberikan pelayanan kepada publik.

Pemeriksaan video

Agus mengatakan, pihaknya telah memeriksa dua video terkait kasus itu, yaitu potongan video yang beredar di media sosial serta video utuh yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Keaslian video kami uji. Dari hasil analisis sementara, tidak ada video yang diedit atau disisipi," kata Agus terkait video yang tersebar di media sosial.

Namun, analisis itu belum final. Agus menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil kajian laboratorium digital forensik Polri untuk menentukan keaslian konten dalam potongan video yang menjadi bahan laporan terhadap Basuki.

Hingga kini penyidik telah memeriksa 10 saksi. Pada pekan ini, penyidik akan meminta keterangan sejumlah ahli, seperti ahli agama, bahasa, dan pidana.

(SAN)

Presiden Tidak Akan Intervensi

SBY Temui Wapres dan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo tak akan mengintervensi penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Presiden juga tak menghalangi aksi unjuk rasa, tetapi hal itu harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

Presiden meyakini, ulama selalu membawa kabar baik serta menjaga dan memberikan tuntunan kepada umat.

”Marilah bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keindonesiaan kita,” ujar Presiden saat bertemu sejumlah ulama dan pemimpin organisasi massa Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).

Selain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, hadir dalam pertemuan antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj. Sementara Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Final

Seusai pertemuan, Ma’ruf mengatakan, bagi ulama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Ulama tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa.

Haedar mengatakan, semua ormas Islam memiliki pandangan yang sama untuk tetap merawat komitmen kebangsaan dan menjaga keindonesiaan sesuai cita-cita pendiri bangsa. ”Jangan sampai komitmen itu terganggu oleh situasi politik tertentu seperti pilkada. Harganya terlalu mahal,” katanya.

Harapan untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia juga disampaikan sejumlah tokoh dan pegiat gerakan masyarakat sipil dengan membuat petisi berjudul ”Jangan rusak pilkada dengan isu SARA!”

Petisi yang kemarin siang diluncurkan di change.org itu antara lain ditandatangani Franz Magnis-Suseno (Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara), Allisa Wahid (pegiat Gusdurian),

Hendardi (Ketua Badan Pengurus Setara Institute), Yudi Latif (pemikir kebangsaan dan kenegaraan), KH Husein Muhammad (pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Cirebon), Karlina Supelli (akademisi STF Driyarkara), Rumadi Ahmad (Lakpesdam NU), dan Nia Sjarifudin (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam petisi itu, antara lain dinyatakan bahwa penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pilkada di Jakarta dan di daerah lainnya menggambarkan lemahnya kualitas demokrasi Indonesia dan kemunduran serius praktik penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Hingga semalam, petisi itu telah ditandatangani 9.639 orang. Dalam petisi itu, Wahyu Gunawan, misalnya, menulis: NKRI bukan milik salah satu golongan. NKRI dengan ke-Bhinnekaan-nya adalah ”harga mati”.

Proses hukum

Terkait dengan dugaan penistaan agama oleh Basuki, menurut Haedar, tidak boleh dibawa ke ranah politik, apalagi SARA. ”Biarkan itu diselesaikan lewat jalur hukum. Karena hanya hukum yang adil yang bisa menengahi situasi yang sedang memanas ini,” katanya.

Presiden, menurut Haedar, mempersilakan aparat mengusut dugaan penistaan agama oleh Basuki. ”Beliau tidak berniat, apalagi melakukan langkah untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Keinginan Presiden kita sambut baik,” katanya.

Menurut Wiranto, saat bertemu dengan para ulama, pemerintah menjelaskan perkembangan proses hukum kasus dugaan penistaan agama tersebut.

”Kapolri sudah melaporkan proses sedang berjalan, bahkan sebelum dipanggil, Gubernur (Basuki) sudah datang sendiri ke kepolisian dan sudah diproses,” tuturnya.

Pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa proses hukum memerlukan tahapan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Oleh karena itu, masyarakat

diharapkan dapat menunggu dengan tenang dan tidak resah.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan, Polri telah mengagendakan gelar perkara penyelidikan kasus tersebut pada pekan ini. Hasil gelar perkara akan menentukan kelanjutan pengusutan kasus tersebut, termasuk keperluan penyidik untuk memeriksa Basuki.

Dalam pengusutan kasus ini, Polri telah memeriksa 15 saksi serta sebanyak lima ahli, seperti ahli bahasa dan ahli hukum pidana. Penyidik masih merencanakan meminta keterangan dari empat ahli lainnya, di antaranya ahli agama. Pemeriksaan ahli ini diharapkan juga rampung pada pekan ini.

Unjuk rasa

Terkait rencana unjuk rasa pada 4 November, Wiranto mengatakan, Presiden tidak menghalangi karena itu merupakan bagian dari hak warga menyampaikan pendapat. Namun, jangan sampai kebebasan mengungkapkan pendapat itu mengganggu kebebasan orang lain.

"Hendaknya penyampaian pendapat itu disampaikan sesuai dengan rambu-rambu, peraturan yang ada. Jangan sampai ada yang merusak, mencekam, atau warga takut," kata Wiranto usai bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang datang ke

kantornya, kemarin siang. Saat itu, Yudhoyono tidak memberi pernyataan kepada wartawan yang menunggunya.

Seusai menemui Wiranto, kemarin petang Yudhoyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 25 menit itu, Yudhoyono hanya mengucapkan selamat malam kepada wartawan yang menunggunya dan segera masuk ke mobil.

Sementara Kalla mengatakan, dalam pertemuan itu, dirinya dan Yudhoyono yakin aksi unjuk rasa pada 4 november akan berjalan dengan baik, tanpa dan tidak anarki.

Saat ditanya wartawan apakah dalam pertemuan itu Yudhoyono memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya di balik aksi unjuk rasa pada Jumat mendatang, Kalla mengaku tidak percaya Yudhoyono melakukan hal itu.

Selasa kemarin sekitar pukul 21.00, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk menemui Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Hingga pukul 22.40, pertemuan di antara keduanya masih berlangsung.

**(INA/EDN/WAD/SAN/NTA/
OSA/APA/DEA/AGE/FRN/HAR)**

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Pemerintah Jamin Keamanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat tak perlu resah terhadap unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang digelar esok. Pemerintah menjamin keamanan masyarakat.

”Besok beraktivitas saja seperti biasa. Pokoknya besok aktivitas normal,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Sekitar 4.000 personel terdiri dari aparat Polri, TNI, dan satpol PP, kemarin, melakukan apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta. Mereka bagian dari sekitar 18.000 aparat yang besok mengamankan aksi unjuk rasa. Hadir dalam apel ini, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut Kapolri, sesungguhnya sudah tidak ada alasan untuk berunjuk rasa karena Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Polri juga sedang mengusut kasus itu.

Namun, Kapolri mengatakan, unjuk rasa tersebut tidak dilarang karena merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Namun, unjuk rasa tersebut harus berlangsung damai dan tidak anarki.

”Apabila demo meningkat menjadi anarki bahkan radikal, yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia, di mana pun berada, jangan sampai terkena dampak anarki dan radikal tersebut,” kata Panglima TNI kepada pasukannya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menuturkan, pengamanan tidak hanya terpusat di lokasi unjuk rasa, yaitu kawasan Istana Presiden, tetapi juga di sejumlah lokasi lain. Semua pengamanan itu akan dilakukan melalui cara-cara persuasif.

Pertemuan

Sepanjang minggu ini, sejumlah elite politik dan tokoh masyarakat melakukan pertemuan yang sebagian di antaranya terkait dengan unjuk rasa esok

hari. Senin lalu, Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan esok harinya pertemuan antara Presiden dan sejumlah ulama serta pimpinan ormas Islam.

Pada Selasa lalu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Setelah itu, Yudhoyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terkait dengan sejumlah pertemuan tersebut, Yudhoyono menilai semuanya baik. ”Janganlah kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka yang berada di luar kekuasaan, lantas dicurigai. Intelijen harus akurat. Jangan berkembang menjadi intelijen *ngawur* dan main tuduh,” kata Yudhoyono di rumahnya di Cikeas, Bogor, kemarin.

Jika dikaitkan dengan situasi sekarang, kata Yudhoyono, informasi atau analisis intelijen yang menuduh seperti itu sangat berbahaya. ”Menuduh seseorang, menuduh sebuah kalangan, menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu, saya kira itu fitnah. Fitnah lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan,” ujarnya dalam pidato yang disampaikan sekitar 48 menit itu.

Wiranto mengatakan tidak perlu menanggapi pernyataan Yudhoyono tersebut. ”Tidak perlu saya elaborasi pernyataan Pak Yudhoyono. Saya tidak perlu menilai karena dia juga mantan pejabat, tahu apa yang diucapkan,” ujarnya.

Ketua Partai Golkar Yorrys Raweyai berpendapat, Yudhoyono tidak perlu secara defensif mengklarifikasi sesuatu yang disebutnya sebagai informasi intelijen. Sebab, selama ini belum pernah ada tuding langsung terkait sosok di balik aksi unjuk rasa 4 November.

Terkait dengan pernyataan Yudhoyono yang menilai intelijen tidak akurat dengan menyebut ada partai politik di balik unjuk rasa 4 November, Ketua Partai Nasdem Taufik Basari menuturkan, Yudhoyono seharusnya bisa memilah informasi dan tidak memberikan pernyataan yang membingungkan rakyat.

Isi pidato Yudhoyono di Cikeas itu, menurut Taufik, akhirnya terlalu berlebihan, tidak menunjukkan sikap kenegarawan, dan justru memanaskan situasi.

Ketua Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai sikap Yudhoyono ini kontras dengan sikap Prabowo yang merupakan rival dari Jokowi pada Pemilu Presiden 2014, yang justru mampu memberikan pesan sejuak kepada masyarakat.

"Kami menghargai pandangan Yudhoyono. Namun, sebagai tokoh bangsa, Yudhoyono seharusnya ikut mengambil peran menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin kembali mengingatkan setiap elite politik agar menahan diri.

"Main politik merupakan hak dari setiap elite politik, tetapi hendaknya tetap dalam koridor dan aturan sebagai negara yang berideologi Pancasila," kata Ade.

(APA/NTA/OSA/AGE/INA/FRN/ZAK/ESA/KOR/WIE/
BAY/JUM/IKI/WAD/PIN/MKN/MDN/WIN/HAR)

6. KOMPAS(Nasional) - Kamis, 03 Nov 2016 Halaman: 27

KAMPANYE PILKADA

Anggota Ormas Tolak Basuki

JAKARTA, KOMPAS — Anggota organisasi massa menolak kedatangan calon gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di kawasan Pasar Kembang, Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (2/11) sore. Sekitar 100 anggota Brigade Mobil, 30 personel Polsek Kebon Jeruk, dan puluhan anggota TNI dan Satpol PP yang berjaga di sekitar pasar menghalau massa tersebut. Bus mini yang membawa personel Brimob dilempari telur.

Melihat situasi memanas, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kebon Jeruk Inspektur Satu Andry Andryanto S Randotama membawa Basuki dan rombongan ke Polsek Kebon Jeruk dengan kendaraan angkot M-11. "Ahok *gak* boleh datang ke sini. Bapak polisi mohon mengerti. Situasi lagi memanas, *nih*," teriak seorang pria dengan wajah tertutup masker.

Di salah satu sudut tampak puluhan pria bermasker membawa gulungan kertas karton dan megafon, bergerombol di samping jajaran polisi. Polisi mendatangi dan membujuk mereka menahan diri, tetapi pengunjung rasa terus berdatangan.

Para demonstran yang bersikeras menghadang Basuki terlibat adu mulut dengan polisi. Di saat yang sama, Basuki berjalan menyusuri Jalan Ayub mendatangi warga. Belasan ibu-ibu menyalaminya.

Sesampainya di Jalan Haji Domang, Basuki dan rombongan diarahkan naik mikrolet M11 menuju Polsek Kebon Jeruk. Sebab, suasana makin keruh. Sesampainya di Polsek Kebon Jeruk, Basuki

mengatakan, insiden ini mencoreng citra demokrasi di Indonesia.

Bahtiar, pengurus silat Jawara Betawi yang ikut menghadang rombongan Basuki, mengatakan, warga menolak kedatangan petahana itu dipicu kasus dugaan penistaan agama yang kini sudah ditangani polisi. Warga berharap kasus tersebut diproses hingga tuntas. Mereka meminta polisi memproses kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Jawara Betawi mengaku akan turun ke lapangan pada 4 November. Mereka mengaku akan mengadakan demonstrasi secara damai.

Tetap buka

Di tempat lain, Jacky Setiono, Ketua Paguyuban Kota Tua, mengatakan, para pedagang di pusat perdagangan Glodok, Lindeteves, dan Ketapang, Jakarta Barat, tidak akan menutup usaha pada Jumat (4/11). Ketiga kawasan itu sudah dijaga 200 personel polisi. Mereka terdiri atas 100 personel Brimob dan 100 polisi lain.

"Mereka akan disiagakan mulai Kamis (3/11) siang sampai Sabtu (5/11) siang," ujar Jacky. Hal serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Barat Ade Putra Kurniawan. "Kawan-kawan di Jakbar tetap buka usaha. Kalau usaha tutup, siapa yang mau bayar jasa pekerja kami?" katanya.

(WIN/DEA)

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap akan berkantor seperti biasa sepanjang Jumat (4/11). Masyarakat juga diharapkan beraktivitas secara normal meski hari ini ada unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

”Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas, saya ada di Jakarta,” kata Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/11). Presiden menyampaikan hal itu bersama dengan Wakil Presiden.

Secara khusus, Kalla meminta dunia usaha tetap bekerja seperti biasa agar produktivitas tidak terganggu. Investor tidak perlu khawatir dengan unjuk rasa yang akan digelar hari ini.

Indonesia, kata Kalla, adalah negara demokrasi sehingga unjuk rasa merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan sesuai aturan. ”Jadi biasa saja. Hampir tidak ada hari tanpa unjuk rasa di depan (Istana Merdeka) itu,” katanya.

Terkait unjuk rasa hari ini, Kalla berpesan agar dilakukan secara tertib dan jangan sampai dirusak pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalla juga meminta pengunjung rasa mewaspadaai penyusupan yang bertujuan mengacaukan keadaan.

Menyikapi rencana unjuk rasa tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau warganya agar memperbanyak doa dan melakukan istigasah di masjid atau pondok pesantren (ponpes) masing-masing setelah shalat Jumat hari ini.

”Sejak malam ini (Kamis malam), sebagian ponpes sudah menyelenggarakan doa bersama. Agar unjuk rasa aman dan damai, warga NU lebih baik berdoa atau melakukan istigasah di masjid atau pondok pesantren masing-masing,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, kemarin.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan masyarakat agar tidak

mudah terpancing isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sikap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi menjadi wajib dimiliki.

Pengamanan

Sejak Kamis pagi hingga siang hari, empat helikopter militer terbang dengan prajurit berseragam anti teror mulai dari di atas sekitar Kompleks Istana, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional di Jakarta Pusat hingga ke Jakarta Selatan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, helikopter militer tersebut sedang melakukan latihan biasa yang menjadi prosedur standar operasi TNI.

Sementara itu, kemarin sore, sebagian pengunjung rasa mulai terlihat di Masjid Istiqlal. Hari ini, dari Masjid Istiqlal, pengunjung rasa akan berjalan menuju depan Istana Merdeka.

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan mengatakan, untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, antara lain dikerahkan sekitar 500 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinamakan Pasukan Asmaul Husna karena mereka memiliki kemampuan yang baik tentang agama dan sekitar 300 anggota polisi wanita yang menggunakan hijab.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab mengatakan, tujuan utama unjuk rasa itu adalah menuntut pembuktian Presiden Joko Widodo yang tak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki. ”Kami berkomitmen aksi berlangsung tenang dan damai,” katanya.

Dimintai keterangan

Kemarin, Rizieq dimintai keterangan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus Basuki. Rizieq, yang didampingi belasan petinggi FPI,

dimintai keterangan mulai dari pukul 13.00 hingga pukul 20.30.

Ketika tiba di gedung Bareskrim, Rizieq disambut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto.

Seusai memberikan keterangan, Rizieq meminta Bareskrim Polri mempercepat pelaksanaan gelar perkara kasus tersebut sehingga segera ada titik terang terkait status Basuki.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menyatakan, Rizieq dimintai keterangan sebagai pihak pelapor perkara tersebut dan ahli bidang agama.

Basuki, kata Ari Dono, akan dipanggil ke Bareskrim pada Senin pekan depan. Sebelumnya, Basuki juga telah memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim pada Senin (24/10). Dalam kasus ini, Polri telah memeriksa 22 saksi dan ahli.

Ari Dono menegaskan, Polri tidak terpengaruh dengan kondisi apa pun dalam mengusut kasus ini. "Kami tidak ada kaitannya dengan desakan. Proses penegakan hukum tetap berjalan. Kami tidak akan terpengaruh dengan kondisi apa pun," katanya.

(TIM KOMPAS)

8. KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 05 Nov 2016 Halaman: 01, 15 Penulis: JAL; WAD; DEA; IRE; WIN

AKSI SIMPATIK

Menyampaikan Aspirasi sambil Bersih-bersih

Di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat Jakarta, Jumat (4/11), ada orang-orang yang "bergerilya" menjaga agar aksi massa tidak merusak dan meninggalkan sampah. Aspirasi boleh diteriakkan, tetapi kebersihan dan ketertiban kota tetap harus terjaga.

Matahari menyengat meski sudah beranjak turun ke ufuk barat. Di bawah terik mentari, seorang pria berkemeja koko warna putih menenteng kantong besar warna hitam penuh sampah.

Ibnu (30), nama pria itu, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain di Jalan Silang Merdeka Tenggara, Jakarta Pusat. Keringat membasahi wajahnya sore itu.

Sejak siang, pekerja bengkel itu ikut dalam aksi demonstrasi menuntut tindak lanjut kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Di tengah-tengah aksi, dia melihat sekumpulan ibu-ibu yang membagikan kantong sampah.

Ibnu pun mengambil satu kantong kosong dan mulai memungut sampah. "Saya ke sini setelah shalat Jumat dari rumah di Bekasi. Daripada jalanan kotor, saya ikut membersihkan jalan. Sudah dua kantong sampah dari siang tadi," ujarnya.

Tak jauh dari tempat Ibnu, tepatnya di depan gerbang Galeri Nasional Indonesia, 20 kantong hitam besar dikumpulkan di tepi jalan. Isinya berbagai sampah sisa makanan, plastik minuman, tali, dan bermacam-macam kertas. "Yang punya sampah di kantong ditaruh di sini. Sampahnya, ayo, sampahnya," ucap Hilda Safitri (48) di dekat tumpukan kantong sampah itu, saat sejumlah peserta demo melintas. Sebagian peserta aksi mulai pulang saat itu.

Hilda, koordinator Gerakan Relawan Ibu-ibu Lenteng Agung (Gerilya), mengatakan, jumlah sukarelawan yang tergabung dalam divisi kebersihan lebih dari 1.000 orang. Sukarelawan itu terbagi dalam tiga seksi, yaitu kebersihan, penjagaan taman, dan tim penyapu. "Ini merupakan gerakan kesadaran kami agar aksi tetap berjalan tertib dan bersih. Kami ingin tunjukkan Islam itu bersih dan damai," ujar Hilda.

Lina Farida (33), peserta aksi dari Ciputat, Tangerang Selatan, memunguti sampah dengan tangan telanjang. Staf perpustakaan sebuah universitas itu mengatakan, ia melakukannya dengan kesadaran sendiri. "Karena kebersihan bagian dari iman," katanya.

Jalan yang tadinya bertebaran sampah perlahan bersih. Sejumlah tim sukarelawan bahkan menyapu jalanan dengan sapu lidi yang disiapkan sendiri.

Area Masjid Istiqlal, yang merupakan pusat konsentrasi massa, juga bersih dari sampah. Puluhan sukarelawan berkeliling memunguti sampah dan menyapu area masjid yang dibangun pada era Presiden Soekarno tersebut. "Yang awalnya bersih, akhirnya juga harus bersih," tutur seorang sukarelawan.

Selfi (42), pengunjung rasa lain, gesit berjalan ke sana kemari menerobos massa yang bergerak dari Patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Istana Negara.

Ladang amal

Sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.00, ia sudah mengumpulkan lima kantong plastik besar sampah. "Saya enggak bisa teriak-teriak orasi, *ngumpulin* massa juga enggak bisa. Biasanya cuma kasih tenaga *ngumpulin* sampah. Lumayan untuk ladang amal," ujar perempuan berhijab dari Jakarta Timur itu sembari tersenyum.

Selfi mengatakan, dirinya dan beberapa rekannya secara sukarela mengajukan diri jadi sukarelawan pemungut sampah sebagai respons atas imbauan Ustadz Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).

Selain Selfi, banyak pula sukarelawan dari Subang, Jawa Barat, yang ikut memungut sampah. Jajang Supriatna (30), salah satunya, memilih menepi di dekat Balai Kota Jakarta sembari menenteng kantong plastik besar.

Menurut Jajang, umat Islam harus bisa menjaga kebersihan saat berdemo. Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai menjaga kebersihan lingkungan. Massa diharapkan bahu-membahu membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak taman kota di sekitar lokasi demo.

Jajang mengatakan, sukarelawan cinta kebersihan tidak dibentuk secara khusus. Sukarelawan berasal dari siapa saja yang mau bersedekah tenaga untuk kebersihan. Sebagian sukarelawan cinta kebersihan itu berasal dari pondok pesantren Daarut Tauhid dan Al Quran Learning Islamic Center. Mereka datang ke Jakarta sejak Kamis malam dan menginap di Masjid Istiqlal.

Selain mengumpulkan sampah dengan berjalan berkeliling, peserta unjuk rasa juga meletakkan

kantong sampah besar setiap jarak sekitar 25 meter di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, tempat konsentrasi massa. "Ini atas inisiatif sendiri karena kemarin (pada aksi sebelumnya) ada berita yang tak sesuai keadaan di lapangan. Katanya pendemo merusak tanaman dan membuang sampah sembarangan setelah aksi," kata Yon Ahmadiarsih (40), sukarelawan dari Mitra Umat Bahagia, Pisangan Baru, Jakarta Timur.

Gerakan sama dilakukan masyarakat umum di luar peserta aksi itu. Gerakan "Turun ke Jalan Bersihkan Sampah, Dikumpulin untuk Sedekah" itu disebarkan melalui media sosial dan digagas seorang mahasiswa, Ganjar Satrio (22).

Aksi ini diikuti belasan anak muda. Peserta sudah membawa kantong sampah besar sendiri-sendiri untuk bekal. Mereka membersihkan sampah dari Tugu Tani ke Tugu Monas.

Ganjar mengatakan, aksi mengumpulkan sampah itu tak terkait organisasi apa pun. "Biasanya kalau ada kumpul-kumpul, ada sisa sampah. Kami hanya ingin ikut membantu membersihkan saja. Tak ada kaitan dengan unjuk rasa," katanya.

Melindungi taman

Selain para pemungut sampah, di antara pengunjung rasa juga terlihat orang-orang yang bertugas mencegah peserta menginjak tanaman di jalur hijau. Seperti terlihat di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di samping halte Transjakarta Monas. "Pak, jangan lewat sini, nanti tanamannya rusak. Banyak wartawan di sini, nanti nama Islam jadi jelek," kata salah satu peserta unjuk rasa kepada pengunjung rasa lain yang hampir menginjak tanaman.

Meski sudah diperingatkan, ada saja pengunjung rasa yang mencoba menerobos dan hampir menginjak tanaman sehingga terpaksa ditegur. Biasanya mereka segan karena yang menegur seorang perempuan. Akibatnya, tidak ada tanaman yang rusak akibat terinjak seperti pada aksi sebelumnya.

Namun, aksi-aksi simpatik ini rusak karena sebagian massa tetap bertahan hingga batas waktu unjuk rasa berakhir pukul 18.00. Akibatnya, bentrokan dengan aparat pecah. Sampah kembali tumpah, damai pun terusik.... (JAL/WAD/DEA/IRE/WIN)

Unjuk Rasa di Daerah Berlangsung Damai

Warga Ingin Persatuan dan Kedamaian Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Aksi menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama juga terjadi di sejumlah daerah, Jumat (4/11). Aksi yang berlangsung setelah shalat Jumat ini berlangsung damai.

Selain orasi, aksi tersebut juga diisi dengan doa dan zikir seperti yang berlangsung di Aceh dan Bandung.

Di Aceh, doa dan zikir dilakukan oleh sekitar 700 orang di gedung DPR Aceh. Awalnya, pengunjung rasa bergerak dari Masjid Raya Baiturrahman yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari gedung DPR Aceh.

Di Bandung, sedikitnya 1.000 umat Islam menggelar istigash di Masjid Raya Bandung di kawasan Alun-Alun Jalan Asia Afrika, Bandung.

Aksi damai untuk menuntut penegak hukum memproses dugaan penistaan agama itu juga dilakukan di 15 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Aksi itu bahkan disebut sebagai unjuk rasa terbesar sepanjang 2016 di wilayah Jateng.

”Dianggap besar karena serentak dilakukan di sejumlah daerah. Setiap daerah menggerakkan massa yang cukup banyak, ratusan. Sudah lama tidak ada aksi seperti ini,” kata Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Tatang, Jumat pagi, di kantor Polda Jawa Tengah.

Di Solo, unjuk rasa digelar secara terpisah di dua lokasi. Ribuan orang yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta menggelar unjuk rasa yang dimulai di depan gerbang Stadion Manahan Solo. Mereka bergerak menuju Masjid Mujahidin, Sumber, Solo, yang berjarak sekitar 500 meter dari kediaman pribadi Presiden Joko Widodo. Massa lain yang merupakan gabungan sejumlah ormas berunjuk rasa di Gladak, Solo.

Untuk mengamankan kediaman pribadi Presiden Jokowi, aparat kepolisian pun menutup Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Solo. Polisi berbaris menutup akses menuju jalan itu. Pengamanan dilakukan secara berlapis oleh polisi wanita, satuan Sabhara, dan Brimob. Kendaraan barakuda juga tampak disiagakan.

Di Medan, Sumatera Utara, unjuk rasa yang diikuti lebih dari 10.000 warga dari puluhan ormas Islam berlangsung dengan tertib. Peserta aksi berkonvoi sepanjang 15 kilometer dari Masjid Agung Medan ke markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selain di Medan, Kepala Biro Operasional Polda Sumut Kombes Rudi Hartono mengatakan unjuk rasa juga terjadi di antaranya di Binjai, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Asahan, dan Tapanuli Selatan.

Aksi serupa juga digelar di kota-kota lain, seperti Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Padang (Sumatera Barat), Jambi, Palembang (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Balikpapan (Kalimantan Timur), Ambon (Maluku), dan lain.

Aksi-aksi itu, di sebagian kota, bahkan tak mengganggu aktivitas warga. Di Ambon, masyarakat tetap bisa berkegiatan seperti biasa. Aksi dilakukan di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia dan perempatan Jalan AY Patti dan AM Sangaji itu.

Demikian pula di Kota Palu. Aksi sekitar 2.000 warga tidak mengganggu aktivitas pemerintahan dan ekonomi di kota tersebut. Kantor pemerintah, pertokoan, perbankan, dan warungwarung masyarakat tetap buka. Seusai aksi, sebagian demonstran mengumpulkan sampah berupa botol bekas air mineral, bungkus camilan, dan kardus.

Tebang pilih

Koordinator Istigash Kiagus Zaenal Mubarak yang akrab dipanggil Deden mengemukakan, istigash yang digelar di Bandung merupakan gerakan atau inisiatif masyarakat untuk berdoa bersama agar unjuk rasa berlangsung damai dan tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

”Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap bangsa ini agar senantiasa persatuan dan kesatuan terjaga dengan baik. Masyarakat bersama-sama berdoa agar para pemimpin kita tidak terus-terusan marah, melainkan bisa adem dan menyelesaikan

segala permasalahan bangsa ini dengan baik,” kata Deden.

Sementara itu, Ketua DPR Aceh Muharruddin menuturkan, kepastian hukum akan membuat aksi tidak melebar ke mana-mana. ”Aksi ini jangan sampai melebar ke isu SARA, etnik, dan politik. Ini murni aksi menuntut tindakan hukum,” kata Muharruddin.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Koordinator Aksi Warga di Palembang, Ragil Pamungkas. Ia berharap, pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Banyak kasus penistaan agama yang langsung diproses hukum. Ia meminta aparat kepolisian juga memberlakukan hal serupa untuk semua orang, tak terkecuali Basuki.

Libatkan anak

Dalam aksi kemarin, sejumlah anak kecil juga turut dilibatkan. Hal ini tampak, antara lain, dalam aksi

yang digelar masyarakat Palembang. Ragil Pamungkas membantah telah melibatkan anak-anak untuk berunjuk rasa. Namun, anak-anak itulah yang ingin berpartisipasi. ”Di sini, mereka bisa belajar mengkritik masalah yang ada,” ujarnya.

Kejadian serupa juga terlihat di Balikpapan. Berdasarkan pantauan, terdapat anak-anak hingga bayi diajak dalam aksi damai yang berlangsung sekitar 3-4 jam tersebut.

Kepala Kepolisian Resor Balikpapan Ajun Komisaris Besar Jefri Dian Juaniarta, yang memantau langsung jalannya aksi, mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan larangan bagi peserta aksi untuk mengajak anak di bawah umur. ”Mungkin tidak punya pembantu di rumah, jadi diajak,” katanya.

(AIN/WSI/NSA/ZAK/ITA/RAM/JUM/ESA/PRA/ENG/DL/FRN/SEM/ADY/SYA/DIA/ACI/WER/ETA/DIT/RWN/KRN/WIE/EGI)

10. **KOMPAS(Nasional) - Minggu, 06 Nov 2016** Halaman: **01, 15**

Presiden Punya Data Intelijen

Tudingan Ada Aktor dalam Demo Tak Mendasar

JAKARTA, KOMPAS — Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak sembarangan bicara terkait aktor yang menunggangi kerusuhan dalam aksi damai Jumat malam. Presiden punya data, yaitu laporan intelijen, laporan kepolisian, dan lainnya.

”Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Presiden itu bukanlah sembarangan. Polisi tentu segera menindaklanjutinya dalam waktu dekat ini. Bukan TNI, lho. TNI hanya mengamankan kondisi,” ujar Panglima TNI kepada *Kompas* di Jakarta, Sabtu (5/11) malam.

Saat ditanya apakah Panglima TNI yakin aktor itu ada, Gatot meyakinkannya. Menurut dia, Polri harus segera menindaklanjuti supaya pernyataan Presiden bukan sekadar pernyataan yang bisa membingungkan masyarakat.

”Bukti jelas. Sekitar 200.000 orang itu sejak Jumat siang sampai sebelum shalat Isya berunjuk rasa tertib dan damai. Tuntutannya sudah dipenuhi pemerintah. Namun, ada pihak lain yang tetap tidak mau meninggalkan kawasan di depan Istana,” ujar Panglima TNI.

Salah besar

Namun, dalam jumpa pers Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ketua gerakan itu, Bachtiar Nashir, membantah pernyataan Presiden yang menyebut unjuk rasa telah ditunggangi oleh aktor politik.

”Aktor politik yang disebutkan oleh Presiden salah besar dan tidak mendasar. Kecuali, Presiden dapat informasi dari intelijen dan memiliki bukti sendiri. Itu di luar domain kami,” katanya.

Terkait unjuk rasa damai yang berubah menjadi rusuh, Bachtiar membantah gerakan yang dipimpinnya sebagai pemicu. Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi bagian dari gerakan itu justru mencegah kerusuhan terjadi dengan berada di antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. ”Pemicu kerusuhan adalah provokator. Entah dari mana provokator itu berasal, tetapi yang jelas bukan dari kami,” ujarnya.

Pembina GNPf-MUI Rizieq Shihab mengatakan pula tak mengenal massa yang menjarah toko dan

membuat kerusakan di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat malam.

Secara terpisah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mulyadi P Tamsir membantah tuduhan polisi yang menyebut anggota HMI sebagai pemicu keriuhan. Ia mengatakan keriuhan dipicu provokator beratribut HMI.

Sementara Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sesuai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu malam, mengatakan, penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan Al Quran oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama secara terbuka dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemaparan hasil temuan penyidik itu akan menentukan apakah kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan penetapan Basuki sebagai tersangka atau tidak.

Menurut Tito, gelar perkara hasil penyelidikan Polri itu sesuai perintah Presiden dijalankan secara transparan. Presiden menekankan agar Polri menjalankan proses hukum itu secara cepat dan transparan.

Tito juga menjelaskan, penyidik akan memanggil Basuki untuk dimintai keterangan pada Senin besok. Penyidik juga akan meminta keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Basuki untuk meringankannya dalam proses penyelidikan ini.

"Memang (gelar perkara) ini tidak wajar kita lakukan secara *live*. Namun, ini perintah dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi," ujar Tito.

Penyidik, kata Tito, sudah meminta keterangan 10 saksi ahli, yakni yang diajukan pelapor, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 7 orang yang diajukan penyidik. Saksi ahli itu berasal dari ahli agama Islam, ahli hukum pidana, dan ahli bahasa. Namun, Komisi Kepolisian Nasional berharap Polri mampu menyelesaikan kasus ini tanpa ada intervensi, termasuk membatasi waktu pengusutan.

"Hal itu bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," ujar Sekretaris Kompolnas Bekto Suprpto.

Kembali normal

Setelah unjuk rasa, situasi kota Jakarta kembali normal. Semua rute dan koridor PT Transjakarta tetap dilayani normal tanpa terkecuali untuk melayani pelanggan. "Koridor I hingga XII tetap akan beroperasi normal," kata Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transjakarta.

Kawasan Glodok Elektronik, Pasar Pagi, ITC, dan Mal Mangga Dua, Jakarta Barat, sudah beroperasi secara normal. Kios, gerai, dan toko sudah buka mulai pagi hingga pukul 17.00. Tak ada lagi aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Padahal sehari sebelumnya, Jumat siang, kawasan Glodok tutup setelah pagi hari sempat dibuka.

Hampir seluruh pengunjung rasa telah kembali pulang ke tempat asalnya Sabtu pagi, sebelumnya sempat akan menginap di Kompleks Parlemen. Massa yang sempat berkumpul di Kompleks Parlemen membubarkan diri Sabtu pagi setelah ditemui Ketua MPR Zulkifli Hasan dan anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Aboe Bakar Alhabsyi.

Sesuai pertemuan, Zulkifli meminta massa kembali ke daerahnya masing-masing. DPR juga menyediakan akomodasi bus untuk memulangkan demonstran. Pemulangan pengunjung rasa juga dibantu Kementerian Perhubungan yang menyediakan sejumlah bus.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Tarmijo Damanik, Sabtu, mengatakan, Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Sosial juga ikut memulangkan pengunjung rasa yang tercecer dari rombongan. Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi Kolonel Arh M Desi Ariyanto mengemukakan, Mabes TNI AD Sabtu pagi mengangkut sekitar 900 pengunjung rasa ke daerah masing-masing di Jabar dengan mengerahkan 30 bus.

Terkait unjuk rasa damai pada Jumat lalu, seluruh elemen bangsa diminta menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum menjaga dan memperkuat keutuhan Indonesia. "Indonesia haruslah tetap aman dan demokrasi tetap terjaga jika informasi-informasi yang bertebaran melalui media sosial tidak ditelan mentah-mentah sebagai kebenaran," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj juga meminta masyarakat untuk menjaga kebersamaan. "Ke depan, kita harus kembali pada kebersamaan meskipun berbeda ras, suku, dan agama," ujarnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris meminta agar Presiden Jokowi bersikap tegas dan bijak agar negara ini tetap utuh dan demokrasi terpelihara dengan baik. "Presiden haruslah menunjukkan loyalitasnya sebagaimana dituntut konstitusi dan para pemilihnya," kata Syamsuddin.

(HAR/NTA/HAM/APA/OSA/CHE/IKI/ESA/SEM/DEA/
MDN/HLN/PIN)

DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Konsolidasi Politik dan Kenegaraan Dibutuhkan

BOGOR, KOMPAS — Meski tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi Tanah Air saat ini, pemerintah menilai masih dibutuhkan konsolidasi politik dan kenegaraan. Terkait hal itu, dalam minggu ini pemerintah akan mengundang tokoh politik dan tokoh agama untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk dan mendinginkan suasana.

”Kami terus mengundang tokoh politik, tokoh agama, untuk memberikan masukan dan hal-hal seperti itu akan kami lakukan dalam minggu ini,” kata Presiden Joko Widodo, Minggu (6/11), di Istana Bogor, Jawa Barat, saat melakukan komunikasi jarak jauh dengan sekitar 400 warga Indonesia di Australia.

Acara itu diadakan setelah Presiden menjadwalkan ulang rencana kunjungan kenegaraan ke Australia. Presiden semula akan terbang ke Australia Sabtu malam lalu, tetapi ditunda setelah Jumat silam ada unjuk rasa besar-besaran terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam komunikasi jarak jauh, kemarin, warga Indonesia di Australia berkumpul di Olympic Arena, Sydney. Hadir di Sydney antara lain Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphath Kesoema, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Dalam acara tersebut, perwakilan pemuda Indonesia di Australia membacakan ikrar tentang seruan agar pemerintah menjaga kedamaian dan persatuan. ”Kedamaian, kami berharap Presiden Jokowi tetap berkomitmen menjaga kedamaian Indonesia. Persatuan, kami berharap bangsa Indonesia yang beragam tidak terpecah belah oleh alasan apa pun. Ketegasan, kami berharap pemerintah memastikan terlaksananya reformasi hukum untuk meningkatkan integritas bangsa Indonesia.”

Seruan perdamaian

Seruan perdamaian dan persatuan, kemarin, juga muncul dalam acara Jalan Sehat, Doa Lintas Agama

untuk Pahlawan Bangsa, dan Pentas Seni di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Acara itu digelar untuk memperingati Hari Pahlawan. ”Persatuan dalam sebuah kebersamaan senantiasa harus dijaga, dan ini membutuhkan peran tokoh agama yang merupakan bagian penting sebagai perekat kehidupan bangsa ini,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam acara tersebut.

Terkait dengan peran tokoh agama ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengapresiasi peran serta para ulama dalam membimbing dan menyejukkan umatnya agar tidak berbuat anarkistis pada aksi Jumat lalu. Apresiasi itu disampaikan Panglima TNI saat berdialog dengan ulama dari sejumlah wilayah di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Secara terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saat Gerak Jalan Kerukunan di Jakarta, kemarin, menyatakan akan terus berkoordinasi dan menjalin dialog dengan pemuka agama. Dia yakin, dialog menjadi salah satu cara mencari titik temu beragam cara pandang.

Basuki diperiksa

Polri merencanakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama pada pekan ketiga November. Terkait hal itu, hari ini Polri akan memeriksa Basuki dan meminta keterangan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin sebagai ahli agama. ”Setelah merampungkan pemeriksaan ahli, kami akan lakukan gelar perkara terbuka dengan mengundang sejumlah pihak,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar

Sementara itu, 10 orang yang diduga melakukan provokasi untuk melakukan aksi anarkistis yang ditangkap polisi saat unjuk rasa Jumat lalu, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Awi Setiyono, telah dibebaskan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. ”Memang ada tiga orang yang melakukan tindak pidana, tetapi alat bukti belum cukup,” ujar Awi.

Awi menambahkan, polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku perampasan kartu memori juru kamera Kompas TV, Muhammad Guntur, saat unjuk rasa lalu.

Kemarin, di Polres Metro Jakarta Pusat, Guntur diperiksa sebagai saksi pelapor kasus dugaan pencurian dan penganiayaan yang dialaminya ketika meliput aksi unjuk rasa 4 November. Dia mengatakan, dua kartu memori kameranya dirampas oleh dua orang. Ia juga mengatakan sempat dipukul ketika ditarik ke kerumunan massa.

Kemarin, Guntur juga membantah tuduhan dirinya sebagai pelempar botol air mineral ke arah barisan polisi. "Saya saat itu membawa peralatan untuk siaran langsung seberat 10 kilogram dan kamera seberat 4

kilogram. Saya tidak mungkin bisa melemparkan botol dengan berat perlengkapan liputan seperti itu dan tangan sedang memegang kamera," ujarnya.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berharap tidak ada lagi jurnalis yang menjadi sasaran kemarahan. "Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Semua hal menyangkut sengketa pemberitaan, ada mekanisme sebagaimana diatur UU Pers. Oleh karena itu, stop menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan," kata Ketua Umum AJI Suwarjono.

(WIN/WAD/GER/AGE/SEM/DIT/CHE/AGE/NDY/SAN /COK/EDN)

12. KOMPAS(Nasional) - Selasa, 08 Nov 2016 Halaman: 01, 15

KOMUNIKASI POLITIK

Presiden Menemui Sejumlah Pihak

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Senin (7/11), memberikan arahan kepada prajurit TNI di Markas Besar TNI Angkatan Darat dan kemudian mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Setelah itu, Presiden menggelar pertemuan dengan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksana, serta sejumlah petinggi TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta.

Hari ini, Presiden dijadwalkan memberikan arahan kepada jajaran Polri, kemudian berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebelumnya, saat melakukan komunikasi jarak jauh dengan 400 warga Indonesia di Australia pada hari Minggu lalu, Presiden menyatakan, saat ini dibutuhkan konsolidasi politik dan kenegaraan (*Kompas*, 7/11).

Sesaat setelah tiba di Markas Besar TNI AD, kemarin sekitar pukul 12.40, Presiden langsung memimpin apel yang diikuti 2.185 anggota TNI dari sejumlah kesatuan. Bertindak sebagai komandan upacara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dalam pengarahannya selama sekitar 5 menit, Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras TNI mengamankan unjuk rasa damai terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, Jumat pekan lalu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Presiden kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini disebabkan PBNU telah memberi pernyataan yang menyejukkan sehingga unjuk rasa Jumat lalu berjalan tertib hingga sekitar pukul 19.00.

Presiden, yang hadir ke kantor PBNU bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, juga mengucapkan terima kasih karena peran NU sebagai penyangga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. NU telah berperan baik menjaga Pancasila, kebinekaan, hal-hal yang terkait toleransi, dan persatuan.

Lamban

Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Said Aqil Siroj berpendapat, tidak tepat apabila memberi stigma bahwa aksi 4 November lalu ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. "Lebih bijaksana, semua pihak mengambil pelajaran dari aksi damai itu," kata Said Aqil Siroj usai menerima Presiden.

Said menerima kunjungan Presiden, antara lain dengan didampingi Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.

Saat pertemuan dengan Presiden, menurut Said, PBNU juga menyayangkan kelambanan pemerintah melakukan komunikasi politik dengan rakyat. PBNU mendesak pemerintah agar segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana kondusif.

Selain mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dan memperkokoh ikatan kebangsaan, PBNU juga mengingatkan bahwa pemimpin tidak boleh

berujar kalimat-kalimat kotor yang menimbulkan kontroversi.

Pemeriksaan

Kemarin, Polri meminta keterangan Basuki Tjahaja Purnama selama 9 jam terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya.

Seusai memberikan keterangan, Basuki memilih tidak banyak berkomentar. Ia hanya menganggukkan kepala kepada puluhan relawan yang mendukungnya. "Saya kira sudah jelas kalau mau tahu yang lain. Silakan tanya kepada penyidik," katanya.

Advokat Sirra Prayuna yang mendampingi Basuki mengatakan, kliennya memberikan keterangan terkait peristiwa 27 September 2016 di Kepulauan Seribu.

Analisis Kebijakan Divisi Humas Polri Komisararis Besar Rikwanto menjelaskan, penyidik meminta konfirmasi Basuki terkait kegiatan pengembangan perikanan yang dilakukannya di Kepulauan Seribu. "Memang ada kata yang terucap (saat di Kepulauan Seribu).

Kemudian, disunting dan menjadi viral seolah ada penistaan agama yang kemudian dipermasalahkan," katanya.

Rikwanto meminta semua pihak menahan diri agar tak memberikan pendapat atau kesimpulan yang tidak semestinya terkait kasus ini. Ia juga mengingatkan agar berhenti menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. "Hati-hati melakukan *hate speech*, fitnah, atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Semua ini terpantau oleh kami. Suatu saat bisa dipermasalahkan apabila mengganggu ketertiban," katanya mengingatkan.

Secara terpisah, Buni Yani membantah dirinya sebagai pihak pertama yang mengunggah, mengedit, atau memotong video pernyataan Basuki di Kepulauan Seribu.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisararis Besar Awi Setiyono mengatakan, polisi akan meminta pertanggungjawaban dari koordinator aksi damai yang berakhir ricuh di sekitar Istana merdeka, Jumat lalu.(GER/WAD/SEM/NDY/SON/APA/NTA/EDN)

13.KOMPAS(None) - Rabu, 09 Nov 2016 Halaman: 01, 15

KOMUNIKASI POLITIK

Presiden Tak Akan Lindungi Basuki



JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Presiden juga menyatakan menerima kritik dari sejumlah pihak terkait kelambanan pemerintah dalam membangun komunikasi politik.

"Sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," kata Presiden seusai bertemu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (8/11).

Presiden mengunjungi PP Muhammadiyah setelah bertemu dengan 602 personel Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Pertemuan dengan Polri dan PP Muhammadiyah ini terjadi setelah sehari sebelumnya Presiden mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kepada Polri, Presiden mengucapkan terima kasih atas kewaspadaan, soliditas, dan profesionalismenya saat mengamankan unjuk rasa 4 November sehingga kegiatan itu berjalan tertib dan damai. Presiden juga menyampaikan simpati kepada 18 anggota Polri yang menjadi korban saat unjuk rasa itu ricuh pada malam hari.

Menurut Presiden, salah satu evaluasi dari unjuk rasa 4 November lalu adalah tentang perkiraan jumlah peserta yang ternyata lebih besar daripada perkiraan sebelumnya.

Kritik

Seusai bertemu PP Muhammadiyah, Presiden menyatakan, kritik yang diberikan Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama merupakan masukan bagi pemerintah.

"Yang belum baik akan kami perbaiki, yang belum bagus akan kami benahi. Karena saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan," ujar Presiden.

Sebelumnya, kepada Presiden, Muhammadiyah mengkritik pemerintah yang lamban melakukan komunikasi dengan rakyat.

Seperti halnya pernyataan NU pada hari Senin lalu, Muhammadiyah juga berharap pemerintah lebih responsif dan mau menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk umat Islam.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menegaskan, unjuk rasa 4 November murni aspirasi keagamaan umat Islam. Muhammadiyah menuntut komitmen dalam menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.

"Yang terakhir, yang berkaitan dengan problem kita sebagai bangsa, kasus (dugaan penistaan agama) ini memang kita harapkan segera berakhir dan ada kata putus agar bangsa ini tidak tersandera 1-2 orang yang bertindak gegabah di kehidupan berkebangsaan kita," kata Haedar.

Saat menerima Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Haedar didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan beberapa ketua PP Muhammadiyah.

Bertemu Megawati

Seusai menerima Presiden, sejumlah pihak dari Muhammadiyah ke rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait situasi kebangsaan saat ini.

"Intinya persatuan dan kesatuan bangsa ini dibina bersama. Jangan sampai aksi massa 4 November dan dugaan penistaan agama oleh Pak Basuki membuat elemen masyarakat terpecah belah dan membuat perdebatan publik yang berlarut-larut," kata Abdul Mu'ti tentang isi pertemuannya dengan Megawati.

Menurut Abdul Mu'ti, penyelesaian secara hukum kasus dugaan penistaan agama itu telah disepakati bersama sehingga semua pihak diharapkan patuh dan mengikuti prosedur yang ada.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga meminta semua pihak sabar dan percaya pada proses hukum yang sedang berjalan. "Sebaiknya masyarakat tenang. Kepala Polri telah menjanjikan proses yang berjalan cepat, tegas, dan transparan," katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan telah menerima informasi adanya rencana aksi lanjutan terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki pada 25 November. Namun, belum ada izin resmi yang masuk ke Polri untuk kegiatan itu. "Ada informasi, kami akan mengantisipasi. Namun, surat izin belum masuk. Biasanya dalam beberapa hari sebelumnya," kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan, Polri akan bekerja profesional, dan jika ada pelanggaran hukum, Polri akan menegakkan. "Ini berlaku kepada siapa pun," ujarnya. **(NTA/OSA/SON/NDY/IAN)**

14. KOMPAS(Nasional) - Rabu, 09 Nov 2016 Halaman: 02

DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Penyidik Masih Kumpulkan Keterangan

JAKARTA, KOMPAS — Penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Penyidik telah meminta keterangan 29 saksi.

Untuk kedua kalinya, anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hamka Haq datang ke Kantor Bareskrim Polri di Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (8/11). Kedatangan Hamka untuk melengkapi keterangannya pada Senin (7/11).

"Tadi disinggung sedikit tentang penggunaan bahasa dan tafsir. Selebihnya, seputar fatwa MUI terkait dengan pernyataan Ahok beberapa waktu lalu," ujar Hamka seussai memberikan keterangan.

Pada Selasa (11/10), Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengeluarkan pernyataan bahwa ucapan Basuki di Kepulauan Seribu dinilai telah menghina kitab suci. Dua hari lalu, Ma'ruf memberikan keterangan pada penyidik Bareskrim Polri di Kantor MUI, Jakarta.

Selain Hamka, pihak pelapor, yaitu Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Khairul Sakti Lubis dan pendiri Yayasan Irena Center, Irena Handono, juga dimintai keterangan. "Kami berkomitmen mengawal kasus ini," kata Khairul.

Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisararis Jenderal Ari Dono Sukmanto meminta semua pihak bersabar karena penyidik masih mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Salah satunya adalah Buni Yani, yang diduga menyebarkan video pidato Basuki ke media sosial. Menurut rencana, Buni dimintai keterangan pada Kamis besok.

Jadi tersangka

Polda Metro Jaya menangkap lima aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diduga menjadi pelaku penyerangan petugas dalam unjuk rasa damai 4 November lalu di sejumlah tempat di Jakarta, Senin malam hingga Selasa dini hari. II, AH, RR, MRB, dan RM sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya hingga Selasa malam. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisararis Besar Awi Setiyono mengatakan, jumlah tersangka bisa bertambah.

Koordinator pengacara aktivis HMI M Syukur Mandar menyayangkan penangkapan paksa. Menurut dia, polisi seharusnya memanggil saja mereka.

Sementara itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk tim pengawas agar tidak ada intervensi dan kriminalisasi dalam penegakan hukum. Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, jangan sampai ada warga yang menjadi kambing hitam. (IAN/WAD/GER/AGE)

15. (Nasional) - Rabu, 09 Nov 2016 Halaman: 05 Penulis: A Ponco Anggoro

DEMOKRATISASI

Unjuk Rasa dan Ujian Demokrasi

Hampir dua dekade setelah runtuhnya sistem otoritarian Orde Baru, 21 Mei 1998, keberlangsungan rezim demokrasi kembali diuji. Ujian yang bisa membawa demokrasi semakin matang atau justru bergerak mundur. Respons Presiden Joko Widodo melalui ujian ini menentukan arah perkembangan demokrasi selanjutnya.

Selama setidaknya enam jam, Jumat (4/11), praktik demokrasi di Indonesia disebut telah mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya, unjuk rasa diikuti ratusan ribu orang. Mereka bebas menyatakan pendapat, sebagai salah satu esensi dari demokrasi, secara damai. Ini sekalipun orasi dari sejumlah orator kerap berupaya membakar amarah massa.

Tak hanya itu, umat Islam yang berunjuk rasa menuntut hukum ditegakkan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, menampilkan wajah yang penuh kedewasaan dalam berdemokrasi.

Para peserta aksi, misalnya, saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak anarkistis, bahkan menjaga agar unjuk rasa tidak merusak tanaman hingga bersedia memungut sampah sisa pengunjuk rasa.

Pengamat politik Fachry Ali dalam acara bincang "Satu Meja" bertajuk "Ujian Demokrasi Jokowi" yang dipandu Pemimpin Redaksi *Kompas* Budiman Tanuredjo di Kompas TV, Jakarta, Senin (7/11) malam, melihat pergerakan itu seperti teater yang indah. Aksi sekaligus menunjukkan revolusi sikap dari pergerakan umat Islam.

Pergerakan ini menjadi model bagi pergerakan lainnya, terkecuali kericuhan yang terjadi di pengujung unjuk rasa.

Malam harinya, seperti diketahui, Presiden Joko Widodo bereaksi, dan menyebut, kericuhan terjadi karena adanya aktor politik yang menunggangi pengunjuk rasa. Hingga kini, belum jelas aktor politik yang disebut Presiden. Hanya janji bahwa Presiden akan mengungkapnya dan memprosesnya secara hukum.

Yang tampak sesudah itu, Presiden melakukan konsolidasi politik. Dia menemui para prajurit TNI yang mengamankan unjuk rasa 4 November, perwira tinggi di kepolisian, dan para tokoh agama di Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Respons Presiden atas unjuk rasa 4 November itu juga menjadi salah satu topik bahasan di "Satu Meja". Selain Fachry Ali, hadir pula sebagai narasumber, yaitu politisi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Yuliantono, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi.

Menurut Hasanuddin, motif lain pengunjuk rasa, selain yang tulus berunjuk rasa karena ingin memprotes pernyataan Basuki yang diduga menistakan agama, memang terlihat.

"Ada yang berunjuk rasa karena tidak suka Jokowi sejak dilantik Presiden dan ada pula yang unjuk rasa karena memang tidak suka dengan Basuki. Selain itu, ada partai politik yang terang-terangan mendukung pemerintah, tetapi ikut unjuk rasa. Selanjutnya terkait dengan kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017," ujarnya.

Pada Pilkada DKI Jakarta, Basuki alias Ahok menjadi salah satu calon gubernur. Berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, dia diusung oleh PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Membingungkan

Berbeda dengan Hasanuddin, Ferry menilai respons Presiden membingungkan publik, menimbulkan perasaan curiga di publik dan antar-elite politik, dan terkesan mengalihkan isu dari isu utama menuntut penegakan hukum atas kasus Basuki. "Unjuk rasa itu bukan persoalan politik, lebih karena panggilan umat Islam," ujarnya.

Jadi, seharusnya Jokowi meresponsnya lebih baik lagi. Kesalahan merespons, justru menuai masalah baru. "Jika rakyat menilai Presiden tidak menganggap masalah ini penting atau respons Presiden tidak serius, rakyat bisa marah," ujarnya.

Didi pun berpendapat hal yang sama. Terlebih tuduhan itu seperti mengarah pada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan motif untuk kemenangan anaknya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Pilkada DKI Jakarta. Ini yang membuat Yudhoyono menggelar konferensi pers, mengklarifikasi tuduhan itu, beberapa hari sebelum unjuk rasa 4 November.

"Seandainya tidak ada Pilkada DKI Jakarta atau Agus tidak maju dalam pilkada, unjuk rasa ini akan tetap muncul karena akumulasi kekecewaan publik kepada Basuki. Pernyataan Basuki yang menyebut salah satu surat di Al Quran hanya salah satu kekecewaan, selain itu ada kekecewaan lainnya, terutama karena tutur katanya yang tidak terkontrol," kata Didi.

Komunikasi

Di tengah instabilitas politik yang terjadi, Fachry menilai upaya Jokowi untuk menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh politik dan agama sudah tepat. Namun, upaya komunikasi juga seharusnya dijalin dengan Yudhoyono. Dengan komunikasi, persoalan yang ada bisa dicari jalan keluarnya.

Jika pertemuan ini terlaksana dan penegakan hukum kasus Basuki dilaksanakan dengan tegas, Fachry yakin periode instabilitas politik kali ini bisa dilalui.

Bakir Ihsan dalam bukunya *Etika dan Logika Berpolitik* menyebutkan konsepsi ideal yang ditawarkan oleh demokrasi sejatinya menjadi jalan mudah untuk mencairkan konflik.

Demokrasi menyediakan lahan dialog, komunikasi, dan diskusi untuk mengartikulasi segala aspirasi. Tinggal bagaimana lahan itu digunakan secara maksimal dan efektif sehingga demokrasi mampu memberi solusi atas beragam mudarat yang dirasakan rakyat.

Perangkat aturan dan kelembagaan yang dibangun dalam sistem demokrasi merupakan alat untuk melancarkan proses sirkulasi aspirasi rakyat. Di sisi lain, keragaman dan pluralitas budaya dalam masyarakat sejatinya menjadi modal penguatan nilai-nilai inklusif, toleran, dan apresiatif terhadap kelompok yang berbeda. Inilah landasan nilai yang dapat merawat demokrasi.

Hanya konsolidasi demokrasi ini kerap terhambat oleh penumpang gelap demokrasi yang mengutamakan elitisme, egopolitik, dan obsesi pada kekuasaan semata.

Pada, Samuel P Huntington dalam bukunya *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, menyebutkan, stabilitas rezim demokratis tergantung, salah satunya, pada kemampuan kelompok elite politik yang utama, untuk bekerja sama dalam menanggulangi masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kemampuan menahan diri dari upaya mengeksploitasi masalah itu guna meraih keuntungan politik atau material bagi diri sendiri.

Akhirnya, untuk menyelesaikan persoalan, tetapkan berpegangan pada prinsip-prinsip demokrasi. Ini terutama Presiden Jokowi, bahwa setiap langkah dan kebijakan menyelesaikan masalah ini akan menentukan maju-mundurnya perkembangan demokrasi di negeri ini.

Begitu pula segenap elite politik lainnya, penting kontribusinya dalam membantu menyelesaikan

masalah ini. Jangan justru memperkeruh suasana untuk mengejar kekuasaan semata.

(A PONCO ANGGORO)

16.KOMPAS(Nasional) - Kamis, 10 Nov 2016 Halaman: 02

Presiden Terus Bersilaturahmi

Sekitar 20 Ormas Islam Diundang ke Istana

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo terus menjalin silaturahmi. Setelah menemui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden bertemu dengan sekitar 20 pemimpin ormas Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11) sore.

Dalam pertemuan kemarin, Presiden kembali menegaskan, tidak akan mengintervensi dan melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukannya. Presiden juga meminta masukan kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah.

Hadir dalam pertemuan kemarin, antara lain Syarikat Islam, Muslimat Nahdlatul Ulama, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan Majelis Rasulullah. Sementara Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, secara terpisah, mengatakan, proses hukum terhadap kasus Basuki harus berjalan karena terkait salah satu pasal pada hukum positif.

Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf, se usai bertemu Presiden, menuturkan, "Presiden menganggap masih ada sebagian umat yang kecewa setelah aksi damai pada 4 November lalu. Kita akan lakukan penenangan kepada umat karena Presiden sudah berjanji untuk tegas dan berlaku adil dalam kasus saudara Basuki."

Proses hukum

Kemarin, Badan Reserse Kriminal Polri kembali meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki. Mereka yang diminta keterangan, antara lain pengajar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam, Ibnu Baskoro.

Selain mengusut kasus dugaan penistaan agama, Polri juga menerima laporan terkait aksi unjuk rasa 4 November lalu. Kemarin, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara-JP) melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri. Perwakilan Bara-JP, Birgaldo Sinaga dan Ferry Simanulang, menilai, pernyataan Fahri saat aksi 4 November bernada provokatif dan mengarah pada upaya makar terhadap pemerintah yang sah.

Menanggapi laporan itu, Fahri Hamzah mengatakan, pada era demokrasi dan reformasi ini, naik dan turunnya Presiden telah diatur dalam konstitusi. Ia beralasan sedang menjalankan tugas pengawasan legislatif.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tidak boleh ada yang menghalangi anggota DPR. Ada hak imunitas bagi anggota DPR. Jadi, ini bukan makar, ini pengawasan," kata Fahri.

Sementara itu, empat anggota DPR, yaitu Junimart Girsang, Trimedya Panjaitan, dan Charles Honoris dari Fraksi PDI-P serta Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat, kemarin, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, mereka mendampingi Basuki saat yang bersangkutan diperiksa di Bareskrim Polri.

Pelaporan ke MKD ini dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPR yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Ahmad Hanafi, salah seorang pelapor, mengatakan, empat anggota DPR diduga jadi pengacara Basuki. Padahal, anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pengacara.

Namun, Junimart Girsang menyatakan, kehadirannya di Bareskrim atas instruksi partainya, yaitu PDI-P, untuk menyiapkan pengacara guna mendampingi Basuki saat pemeriksaan. "Dicek saja di daftar pengacara itu, tidak ada nama saya atau nama tiga anggota DPR lainnya," ujarnya.(HAR/NDY/NTA/UTI/DNE/WAD/AGE/REK/PA)

Cegah Hak Pilih Hilang

Perludem Desak Bawaslu Tindak Tegas Penghalang Kampanye

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didesak mengeluarkan surat keterangan kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Hal ini diperlukan untuk mencegah warga kehilangan hak pilih.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di Jakarta, Rabu (9/11). "Upaya penataan kependudukan harus dipisahkan dengan urusan pemilu. Jangan sampai penataan kependudukan justru menghalangi hak konstitusional warga," ujarnya.

Dalam Pilkada 2017, pemerintah menetapkan warga yang berhak memilih ialah warga yang memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman data untuk pembuatan e-KTP itu.

Titi mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memberikan surat keterangan kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Surat keterangan tersebut fungsinya serupa dengan e-KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman data.

"Masih banyak warga yang belum memiliki KTP elektronik. Padahal, batas waktu perekaman (6 Desember) sudah semakin dekat. Antrean warga yang ingin membuat KTP elektronik sangat panjang, terkadang blangko yang tersedia juga terbatas. Selain itu, proses perekaman KTP kadang lebih dari dua minggu," ungkap Titi.

Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos menambahkan, hingga kemarin, 7.132.865 pemilih telah masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Pilkada DKI 2017. Adapun pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP berjumlah 504.610 pemilih.

"Kami akan menyerahkan data pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicocokkan dengan basis data. Pemilih yang ada dalam basis data akan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara, sedangkan yang

belum masuk basis data akan kami imbau segera melakukan perekaman KTP elektronik," paparnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Jakarta Selatan Muhammad Iqbal mengatakan, posko khusus didirikan di lokasi-lokasi yang warganya baru saja direlokasi untuk menjaring warga yang kemungkinan masih tercecer karena kepindahan tempat tinggal.

KPU DKI Jakarta memberikan batasan waktu perbaikan data pemilih hingga 4 Desember. KPU akan menetapkan daftar pemilih tetap pada 6 Desember.

Penolakan kampanye

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti menyayangkan peristiwa penolakan pasangan calon yang hendak melakukan kampanye. Ia mencatat sudah ada empat insiden penolakan itu, yakni dua kejadian di Jakarta Barat dan masing-masing satu peristiwa di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

"Bawaslu telah memanggil dua saksi dalam kasus penolakan kampanye salah satu pasangan calon di Jakarta Barat. Namun, hingga kini pihak tersebut belum datang," ujarnya.

Rabu siang, puluhan warga melakukan aksi menolak kedatangan calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Mereka bernyanyi meminta Djarot segera keluar dari kawasan itu. Marwan (46), koordinator aksi, menegaskan, aksi itu terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama, pasangan Djarot. "Kami tak ada urusan dengan pilgub. Urusan kami soal penistaan agama yang dilakukan Ahok," ucapnya.

Terkait hal ini, Titi dari Perludem berharap Bawaslu dapat menerapkan Pasal 187 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal itu diatur bahwa orang yang sengaja mengacau, menghalangi, dan menggagalkan kampanye dapat diancam hukuman pidana.

Merry Hotma, anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, menjelaskan, terkait penolakan warga terhadap kampanye Djarot, Rabu siang, tak perlu dihadapi dengan menghadirkan penjagaan ketat. Ia menilai, sikap Djarot yang memilih menghadapi warga yang menolak dan mengajak diskusi mereka adalah pola yang tepat.

Sehari sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya akan melaporkan sejumlah penolakan tersebut kepada polisi dan Bawaslu.

Terkait dinamika Pilkada DKI ini, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menegaskan, jajarannya akan mengutamakan kepentingan 18 juta rakyat Jakarta. Artinya, semua kegiatan kampanye sampai hari pencoblosan tak boleh mengganggu sarana dan prasarana keseharian dan rutinitas kerja warga Jakarta.

”Tak boleh ada lagi aksi menutup jalan, membuat macet jalan, merusak, mengotori fasilitas kota, dan mengganggu kegiatan usaha warga. Mereka yang masih suka memaksakan kehendak akan kami tindak sesuai protap polisi,” tuturnya, Selasa malam.(WIN/HLN/IRE/JAL/DEA/GER)

18. KOMPAS(Nasional) - Jumat, 11 Nov 2016 Halaman: 05

Penegakan Hukum Menjadi Penentu

Safari Presiden Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi politik yang belakangan ini dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menemui sejumlah tokoh akan efektif jika dibarengi dengan penegakan hukum yang adil. Hal yang tak kalah penting adalah konsistensi Presiden untuk tidak mengintervensi proses hukum.

”Komunikasi politik yang dilakukan Presiden tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus berjalan bersama dengan penegakan hukum,” kata Syamsuddin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (10/11).

Setelah menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemarin, Presiden mengunjungi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta. Setelah itu, bertempat di Istana Negara, Presiden bersilaturahmi dengan 78 ulama dan pemimpin pondok pesantren dari Banten dan Jawa barat.

Hari ini, Presiden dijadwalkan mengunjungi Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, dan Markas Komando Marinir di Cilandak, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden telah mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Markas Besar TNI AD, Polri, dan mengundang sekitar 20 ormas Islam di Istana Merdeka.

Saat berada di Markas Kopassus, Presiden menegaskan posisinya sebagai Panglima Tertinggi TNI.

”Saya sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan kepada perwira dan prajurit Kopassus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia,” ujarnya.

Di hadapan korps Pasukan Baret Merah tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa TNI adalah satu. TNI harus bisa berdiri tegak mempersatukan ras, suku, agama, dan menjaga kebinekaan.

Sementara itu, kepada ulama dan pimpinan pondok pesantren di wilayah Banten dan Jawa Barat, Presiden mengatakan, ulama merupakan pilar penopang NKRI. ”Indonesia yang kita bangun bersama, berdiri atas perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para habib, para ustaz, para santri,” ujar Presiden.

Bukan orang pertama

Badan Reserse Kriminal Polri, kemarin, meminta keterangan Buni Yani yang diduga pengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama ke media sosial.

Seusai dimintai keterangan selama sekitar tujuh jam, kepada wartawan, Buni menyatakan dirinya bukan orang pertama yang mengunggah video itu ke media sosial. ”Saya mendapatkan video itu dari Media NKRI yang mereka *upload* (unggah) pada tanggal 5 (Oktober) dan saya *upload* ulang pada tanggal 6 (Oktober) tanpa ada perubahan apa pun,” kata Buni.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto mengatakan, Buni

adalah 1 dari 16 orang yang dipanggil sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki.

Hingga kini, sudah 43 orang yang diminta keterangan sebagai saksi sejak dimulai penyelidikan kasus itu pertengahan Oktober 2016. (DRI/IAN/NTA/SON/NDY/EDN/WAD)

19. KOMPAS(Nasional) - Jumat, 11 Nov 2016 Halaman: 05

SILATURAHIM PRESIDEN

Saat Joko Widodo Mendengar Sambil Lesehan

Setelah aksi unjuk rasa terkait dugaan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (4/11) lalu, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo banyak mendengar aspirasi sebagian umat dan pemimpin umat Islam. Presiden tak hanya mendatangi, tetapi juga mengundang sebagian pemimpin umat Islam ke Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta.

Hari kelima konsolidasi politik dan kenegaraan pada Kamis (10/11), di Istana Negara, sambil lesehan setelah makan bersama, Presiden Jokowi kembali mendengarkan masukan para kiai dan ulama pimpinan pondok pesantren sewilayah Banten dan Jawa Barat untuk memberikan rasa sejuk dan mendinginkan suasana politik.

Jokowi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Johan Budi SP, serta Kepala Kepolisian Daerah Jabar Irjen Bambang Waskito dan Kapolda Banten Brigjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Hadir 78 kiai dan ulama dari ponpes modern dan salafi di antaranya dari Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, dan Kota Depok. Terlihat dalam pertemuan itu KH Sarkowi (Ponpes Al-Fataniyah Serang), KH Ariman Anwar (Ponpes Nurul Anwar Serang), Abuya Muhtadi (Ponpes Raudhatul Ulum Pandeglang), KH Maimun Ali (Ponpes Subulussalam Tangerang), dan Burhanudin Marzuki (Ponpes Qotrunnada Depok).

Kepada pers, se usai bertemu Presiden, para kiai dan pemimpin ponpes menyatakan merasa puas dengan pertemuan tersebut. "Kami apresiasi karena Presiden sangat menerima masukan-masukan kami. Kami harap Presiden juga menemui para habib di sejumlah daerah," ujar Kiai Ahmad Ruhiyat dari Ponpes Tarbiyah, Karawang, Jabar.

Selain itu, tambah Ruhiyat, para kiai dan ulama ponpes meminta Presiden bersikap netral dalam

proses hukum Basuki. "Kami minta Presiden memberikan instruksi ekstra kepada kepolisian agar bisa bekerja profesional dan tak pandang bulu," kata Ruhiyat.

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menag, dan Mensesneg juga menerima 20 ormas Islam ke Istana Merdeka. Duduk berhadapan dengan para pemimpin ormas Islam, Jokowi mendengarkan dengan saksama masukan mereka seraya menjanjikan penyelesaian proses hukum Basuki secara tegas dan cepat.

Se usai bertemu Presiden, juru bicara ormas Islam, Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf, dalam keterangannya kepada pers, menuturkan, "Saya lihat di forum tadi, mukanya (Presiden) saat bicara menjelaskan kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) terlihat *tawadu* (jujur dan tulus). Kan, ada orang yang bicara pura-pura, tetapi kalau dia (Presiden) tidak, dia (Presiden) sangat serius dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saya dan ormas Islam lainnya ikut (terus pertemuan), bahkan ikut shalat maghrib di Istana."

Yusnar menambahkan, Presiden meminta pimpinan ormas Islam dapat ikut menenangkan sejumlah umat yang masih kecewa setelah aksi unjuk rasa damai lalu berlangsung.

Konsolidasi

Silaturahmi Presiden Jokowi ini dimaksudkan untuk menguatkan konsolidasi politik dan kenegaraan. "Kami terus mengundang tokoh politik, agama, untuk memberikan masukan dan hal-hal seperti itu dalam minggu ini," ungkap Presiden Jokowi saat berkomunikasi jarak jauh dengan warga Indonesia di Australia di Istana Bogor, Jabar, Minggu (5/11). Konferensi video dilakukan setelah Presiden menunda kunjungan ke Australia.

Konsolidasi politik dan kenegaraan Presiden Jokowi diawali dengan mendatangi Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama. Hanya ditemani Pratikno, Presiden mendengarkan kritik yang disampaikan, antara lain, oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin. Esoknya, Selasa, Presiden juga mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diterima, antara lain, oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Selain mendengarkan aspirasi pimpinan umat Islam, Presiden juga mendatangi jajaran prajurit dan

pimpinan TNI dan Polri, di antaranya di Markas Besar Angkatan Darat dan Komando Pasukan Khusus TNI di Cijantung. Hari ini, Presiden akan berkunjung ke Mako Brigade Mobil dan Mako Marinir di Cilandak. Tentu untuk menjaga ketenangan kondisi di Tanah Air, kesetiaan prajurit TNI dan Polri sangat diperlukan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.(NTA/NDY/SON/HAM/HAR)

20. KOMPAS(Nasional) - Jumat, 11 Nov 2016 Halaman: 27

DUGAAN PELANGGARAN DIUSUT TUNTAS

Wali Kota Jakarta Barat Amankan Situasi, Tak Ikut Kampanye Djarot

JAKARTA, KOMPAS — Dugaan pelanggaran selama masa kampanye, baik oleh pasangan calon maupun keterlibatan pegawai negeri sipil, juga kasus lain seperti pelanggaran hak untuk kampanye, akan diusut dan ditindak tegas. Semua pihak diminta mematuhi aturan.

Tim sukses pasangan calon (paslon) diminta memberitahukan jadwal dan lokasi kampanye kepada polisi agar pengamanan lebih siap. Selama ini tim sukses paslon ataupun KPU DKI Jakarta tidak pernah memberitahukan kepada polisi. "Terkait penolakan saat kampanye, kami prihatin. Kami belum pernah mendapat jadwal kampanye pasangan calon. Polisi tahunya dari tim kepolisian yang mengawal pasangan calon. Kami berharap ada jadwal kampanye dari KPU, bisa persiapan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Kamis (10/11).

"Polisi tidak bisa menghalangi kalau ada penolakan, tetapi polisi akan mengamankan paslon. Kalau membahayakan, tentu tidak dibiarkan," ujarnya.

Wibi Andriano, Wakil Ketua Tim Kampanye Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, kemarin, mengatakan, tim kampanye Basuki-Djarot melaporkan penolakan warga atas kampanye paslon itu. Penolakan terjadi Rabu (9/11) siang saat Djarot berkampanye di Kampung Bugis, Kembangan Selatan, dan di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kejadian itu dilaporkan pada hari yang sama kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

"Kami ingin menggunakan hak berkampanye aman dan baik tanpa penolakan. Kami menduga yang menolak bukan masyarakat sekitar," ujar Wibi.

Kejadian itu tak berlarut-larut karena segera bisa dinetralkan petugas keamanan yang ada.

Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu dan bukti-bukti yang disertakan tim kampanye. Butuh tiga hari untuk memproses laporan dan dua hari lagi untuk menetapkan peristiwa itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.

Di luar kasus penolakan kampanye, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kembali mengingatkan pentingnya netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pilkada DKI. Ini sebagai tanggapan atas isu kehadiran Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam kampanye Djarot di Kembangan Utara.

Sumarsono se usai melakukan pertemuan dengan Anas di Jakarta, kemarin, mengatakan, "Selain untuk bersilaturahmi dan mengenal tugas-tugas saya, kedatangan saya juga untuk mengingatkan agar pegawai negeri sipil tetap netral dalam pilkada."

Sumarsono meminta klarifikasi Anas. "Kabar Anas mendampingi Djarot dalam kampanye itu tidak benar. Ia hadir di lokasi sebagai penguasa teritorial untuk mengamankan situasi, bukan kampanye," katanya.

"Saya datang untuk menenangkan kondisi. Saya tidak mendampingi Djarot. Ia datang lebih awal 30 menit sebelum saya datang," kata Anas tegas.

PNS dilarang menggunakan fasilitas terkait jabatannya dalam kampanye, tidak membuat keputusan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, serta tidak menggunakan anggaran daerah untuk mendukung paslon. Pelanggaran dikategorikan

pelanggaran disiplin PNS dengan sanksi hukuman disiplin sesuai aturan.

Survei LSI

Lingkar Survei Indonesia (LSI) menilai elektabilitas calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama merosot sejak cagub petahana itu tersandung kasus dugaan penistaan agama. Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, menyampaikan, elektabilitas Basuki pada November ini sudah di bawah 30 persen, persisnya di 24,6 persen.

Elektabilitas cagub Agus Harimurti Yudhoyono naik. Pada Oktober, elektabilitas Agus 19,3 persen. Memasuki November, elektabilitasnya menjadi 20,9 persen, mendekati elektabilitas Basuki. Elektabilitas cagub Anies Baswedan, menurut survei LSI, menunjukkan penurunan. Pada Oktober, tingkat elektabilitas Anies 21,1 persen, tetapi November ini turun jadi 20 persen.

Rapat umum

Paslon peserta Pilkada Kabupaten Bekasi memasang poster dan spanduk dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. "Hampir semua paslon memasang (poster dan spanduk) di pohon. Tetapi, sudah dipindahkan setelah petugas Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) menegur mereka," ujar Iwan Setiyono dari Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bekasi, kemarin.

Dari KPU Kabupaten Bekasi, dijadwalkan kampanye rapat umum empat paslon, yaitu Meiliana Kartika Kadir-Abdul Kholik pada 11 Februari 2017, Sa'duddin-Ahmad Dhani 5 Februari 2017, Obon Tabroni-Bambang Sumaryono 15 Januari 2017, Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja 11 Februari 2017. In Farihin-KH Mahmud memilih tak menggelar kampanye rapat umum yang biasanya dihadiri 30.000 orang. (HLN/WAD/MDN/MKN/GER/ILO)

21. KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 12 Nov 2016 Halaman: 01, 15

Dua Pesan dari Presiden

Silaturahmi Perlu Terus Dijaga

JAKARTA, KOMPAS — Dua pesan utama disampaikan Presiden Joko Widodo selama silaturahmi yang dilakukan minggu ini. Dua pesan itu, pertama, pemerintah tidak mengabaikan aspirasi umat Islam. Kedua, TNI dan Polri sebagai alat negara ada di bawah komando Presiden.

Agar suasana kondusif tetap tercipta di Tanah Air, pemerintah juga perlu terus menjalin silaturahmi dengan tetap menjaga komunikasi intensif dengan semua komponen masyarakat, termasuk umat Islam. Janji Presiden untuk tidak melindungi Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya juga jangan sampai dicerai.

"Jika langkah-langkah itu dilakukan dengan baik, konsolidasi politik dan kenegaraan yang dilakukan Presiden akan berhasil," kata Airlangga Pribadi, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (11/11).

Istilah konsolidasi politik dan kenegaraan disampaikan Presiden saat melakukan komunikasi

jarak jauh dengan warga negara Indonesia di Australia, Minggu lalu di Istana Bogor. Saat itu, Presiden menyatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi Tanah Air setelah unjuk rasa besar pada 4 November.

Namun, Presiden menyatakan akan mengundang tokoh politik dan tokoh agama untuk memberikan masukan guna memberikan rasa sejuk dan mendinginkan suasana (*Kompas*, 7/11).

Kemarin, Presiden mengunjungi Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, dan Markas Komando Korps Marinir di Cilandak, Jakarta.

Gelar perkara

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga terus mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki. Sejak dimulainya pengusutan pada pertengahan Oktober 2016, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto, Bareskrim telah meminta keterangan 66 orang, yang terdiri dari 38 ahli dan 28 saksi pelapor.

Dari 38 ahli yang diminta keterangan, 14 orang adalah ahli agama, 11 orang ahli bahasa, 8 ahli pidana, 2 ahli antropologi, serta masing-masing satu orang ahli psikologi, jurnalistik, dan ahli forensik.

Agus menuturkan, ahli agama dan bahasa mendapatkan porsi paling banyak karena menjadi elemen paling krusial dalam kasus itu.

"Keterangan ahli agama dan bahasa akan menjadi pertimbangan utama yang dilengkapi keterangan saksi dari bidang keahlian lain," ucapnya.

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menuturkan, gelar perkara kasus Basuki akan dilakukan pekan depan dengan sistem terbuka terbatas. Acara itu akan disaksikan pihak pelapor dan saksi ahli yang dipanggil penyidik serta diawasi Komisi Kepolisian Nasional dan Kejaksaan. Komisi III DPR juga akan diundang. Hasil gelar perkara akan diumumkan kepada masyarakat.

Pesan

Saat berada di Mako Marinir dan Brimob, Presiden menegaskan, kehadirannya dalam kapasitas sebagai panglima tertinggi TNI dan pimpinan tertinggi Polri. "Saya ingin memastikan bahwa semua loyal kepada negara, Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI, dan kebinekaan kita. Saya ingin memastikan itu saja," kata Presiden di Mako Marinir.

Prajurit Marinir dan Brimob harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga keutuhan NKRI. Pesan serupa disampaikan Presiden saat berkunjung ke Mako Kopassus, bertemu dengan perwira Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan ketika mengunjungi Markas Besar TNI AD sepanjang minggu ini.

Sementara itu, dalam beberapa kali pertemuannya dengan ulama, pimpinan ormas Islam, dan pengasuh pondok pesantren pada minggu ini, Presiden mengatakan, ulama merupakan pilar penopang NKRI.

Presiden juga meminta masukan dan pertimbangan dari mereka. Dalam pertemuan itu, Presiden juga menjanjikan tak akan melindungi Basuki dalam kasus dugaan penistaan agama ini.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa melihat langkah presiden merangkul kekuatan sipil dari kalangan ormas Islam menunjukkan Presiden turut merasakan apa yang sedang dirasakan umat Islam Indonesia.

Airlangga Pribadi menambahkan, silaturahmi Presiden dengan ormas dan tokoh agama Islam juga mengandung pesan, pemerintah tidak mengabaikan aspirasi umat Islam. Presiden menyadari Islam merupakan bagian penting untuk menjaga dan merawat bangsa Indonesia.

Sementara itu, kunjungan Presiden ke markas TNI dan Polri sebagai upaya penegasan bahwa stabilitas politik hanya bisa dijalankan ketika tentara dan polisi, sebagai alat negara, berada di bawah komando presiden. Kunjungan itu juga menegaskan, TNI dan Polri seharusnya tidak terlibat dalam pembelahan politik.

Namun, untuk menjaga suasana tetap kondusif, kata Airlangga, Presiden perlu memperbanyak dialog dengan kalangan umat Islam dan harus mengingatkan para pejabat publik agar berhati-hati dalam berbicara, apalagi terkait isu agama.

Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan, konsolidasi Presiden selama satu minggu terakhir akan sia-sia apabila tidak diiringi langkah konkret.

"Kanalisis kasus Basuki lewat hukum harus dilakukan dengan tangkas. Pernyataan Presiden bahwa kasus itu harus diselesaikan secara cepat, tegas, dan transparan harus dibuktikan," kata Siti.

(NTA/SON/NDY/NTA/DRI/REK/EDN/OSA)

Keberagaman Jadi Anugerah

Presiden: Saling Ejek dan Memaki Bukan Jati Diri Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Langkah Presiden Joko Widodo menemui sejumlah ulama pada pekan lalu, antara lain, untuk memberikan pemahaman tentang keberagaman bangsa. Keberagaman semestinya dipandang sebagai anugerah dan tidak menjadi sumber perpecahan.

Presiden menyatakan hal itu se usai menghadiri Silaturahmi Nasional Ulama Rakyat "Doa untuk Keselamatan Bangsa", yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Ancol, Jakarta, Sabtu (12/11).

Presiden yang datang mengenakan sarung dan kopiah berdoa bersama dengan lebih dari 5.000 kiai atau ulama kampung dari beberapa daerah di Indonesia.

Sejumlah kiai khos Nahdlatul Ulama (NU) juga hadir pada acara itu, antara lain KH Dimiyati Rois, pengasuh Pondok Pesantren Al Fadluh Wal Fadhila Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Turut hadir pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta menteri yang menjadi kader PKB, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo.

Silaturahmi Nasional Ulama Rakyat merupakan agenda keenam Presiden bertemu dengan ulama, pengurus ormas Islam, dan pengasuh pondok pesantren, yang dimulai Senin lalu. Presiden juga menemui anggota Polri dan prajurit TNI di sejumlah kesatuan.

Hari Minggu ini Presiden dijadwalkan menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Sejumlah ulama besar dijadwalkan hadir pada acara itu, seperti KH Maimoen Zubair dan KH Syukron Ma'mun.

Presiden menerangkan, pertemuannya dengan para ulama selama sepekan terakhir ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang keberagaman bangsa. "Semua ini untuk memberikan penjelasan secara gamblang, memberikan gambaran betapa negara ini majemuk dan beragam sehingga penting sekali saling menghargai dan menghormati," katanya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan Indonesia terdiri atas lebih dari 700 suku dengan 340-an bahasa daerah.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya semua komponen bangsa bisa menerima keberagaman dengan menjaga sikap saling menghargai dan menghormati seperti yang diamanatkan dalam Pancasila. Hanya dengan itu bangsa Indonesia akan terhindar dari perpecahan.

"Oleh sebab itu, pada kesempatan baik ini, saya perlu ingatkan kita semuanya mengenai kebersamaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai ada yang ingin merusak kebersamaan ini, jangan sampai ada yang ingin memecah belah kita," kata Presiden.

Menurut Presiden, masyarakat Indonesia sesungguhnya selalu ingin menikmati indahnya kedamaian. "Kita berharap agar masyarakat dapat saling melindungi dan menghormati satu sama lain. Persaudaraan yang terjalin di tengah perbedaan merupakan suatu anugerah yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia," ujarnya.

Proses hukum

Mengenai unjuk rasa pada 4 November, yang dilakukan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, Presiden meyakini umat Islam berunjuk rasa dengan niat yang baik dan dengan kesungguhan. Di sisi lain, negara menjamin hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Presiden kembali menegaskan sikapnya yang tidak melindungi Basuki dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. "Sudah saya sampaikan, saya tak mau mengintervensi masalah hukum (Basuki Tjahaja Purnama). Serahkan saja ke proses hukum. Ini, kan, sudah diproses. Sebelum demo juga sudah diproses. Saksi-saksi sudah ditanya, saksi ahli sudah didatangkan," kata Presiden.

Presiden juga mengeluhkan ujaran bernada hujatan, ejekan, makian, fitnah, serta ujaran yang mengarah pada adu domba yang tersebar luas di media sosial. Ujaran bernada negatif itu sudah jauh dari karakter bangsa.

"Bangsa kita punya budi pekerti yang baik, punya sopan santun, punya *akhlaqul-karimah*. Saling ejek, saling memaki, saling memfitnah, dan adu domba itu bukan jati diri masyarakat Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta bantuan ulama dan umat Islam untuk saling mengingatkan satu sama lain agar jangan sampai masyarakat terpengaruh dengan ujaran negatif yang jauh dari nilai-nilai kesantunan sebagaimana juga diajarkan dalam agama Islam.

Dalam pidatonya, Muhaimin Iskandar juga meminta para ulama dan kiai turut menenangkan masyarakat. "Tantangan hari ini, karena suasana panas, kami mohon kepada para kiai untuk turut menenangkan masyarakat," katanya.

PKB, ujar Muhaimin, akan mengawal demokrasi yang santun, demokrasi yang berjalan tanpa ada saling hujat. Bukan hanya itu, PKB juga mengajak seluruh umat Islam merapatkan barisan untuk mendukung Presiden Jokowi menghadapi tantangan bangsa. Para ulama diharapkan terus berdoa agar Presiden diberi kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Kekayaan pikiran

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta generasi muda berpikir positif terhadap bangsa, terutama bagaimana agar bangsa Indonesia terus mengalami kemajuan.

Menurut Kalla, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan kritik. Namun, hendaknya, kritik yang disampaikan mengenai apa yang harus diperbaiki untuk memajukan bangsa Indonesia. "Ada kritik, silakan. Namun, dahulukan kemajuannya, baru kritik. Kalau kita semua berpikir di sini, bagaimana siklus (negara) sulit, wah, nanti yang terjadi pikiran pesimistis ada di generasi muda, bahaya," katanya.

Kalla menegaskan, semua organisasi apa pun tujuannya selalu sama, termasuk negara, yakni memajukan bangsa yang adil dan makmur. Langkah-langkah itu hanya dapat dilaksanakan apabila semuanya dikombinasikan dengan kemampuan dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk

dengan pikiran inovatif dan kreatif masyarakat, termasuk generasi muda.

Pada bagian lain sambutannya, Kalla menjelaskan, suatu bangsa yang besar bukan ditentukan oleh berapa besar kekayaan alamnya, melainkan juga ditentukan oleh kekayaan pikiran, inovasi, dan aktivitasnya dalam mengembangkan bangsa. Oleh sebab itu, Kalla menghargai ide-ide dan sumbangan pemikiran dari alumni KAMMI bagi bangsa Indonesia.

Kalla meyakini, pertemuannya dengan alumni KAMMI akan memberikan banyak warna, selain juga dapat bertukar pikiran terkait masalah aktual, mengasah kembali otak, serta mencari inovasi-inovasi baik teknologi, sosial ataupun keagamaan untuk kemajuan bangsa.

Mengenai angka-angka kemajuan sebuah bangsa, Kalla menyatakan, setiap bangsa memiliki angka-angka yang bisa digunakan sebagai perbandingan dengan negara lain. Posisi Indonesia disebutkan selalu berada di tengah-tengah. "Dalam pertumbuhan ekonomi, misalnya. India 7 persen, sementara Indonesia pertumbuhan ekonominya 5 persen. Namun, ada negara lain di bawah Indonesia. Dari sisi kemampuan sumber daya manusia, Indonesia juga cukup baik walau masih harus belajar banyak," papar Kalla memberi contoh.

Karena itulah, Kalla meminta keluarga alumni KAMMI melihat bangsa Indonesia seperti itu serta tidak melihat dari satu sisi saja, tetapi memandang semua sisi.

"Karena kebaikan bangsa kebaikan kita juga. Kesulitan bangsa kesulitan kita juga. Marilah kita pecahkan kesulitan itu dengan suatu kreativitas dan inovasi. Apa pun perjuangan kita, tanpa kreativitas dan inovasi, bangsa ini akan begini terus," kata Kalla.

Dalam sambutan kemarin, Kalla beberapa kali memberikan tanggapan atas sambutan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang juga deklarator KAMMI. "Jadi, tolong juga nanti, yang ahli ekonomi buat siklus kemajuan ekonomi agar dapat dibandingkan dengan siklus lainnya." ujarnya. **(NTA/SON)**

KONSOLIDASI PRESIDEN

Saat Jokowi Bersama Tiga Parpol

Dalam suasana berbeda, Presiden Joko Widodo menutup akhir pekan dengan menghadiri acara tiga partai politik.

Secara kebetulan, parpol yang ditemui adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang memiliki basis massa dari umat Islam. Presiden terlihat rileks saat mengutarakan berbagai hal berkait persatuan dan kesatuan bangsa dalam tiga pertemuan tersebut.

Minggu (13/11) siang kemarin, Presiden, yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional Ke-1 PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, yang diikuti sekitar 2.000 orang. Presiden yang hadir mengenakan batik lengan panjang dan peci hitam itu disambut hangat.

Dari acara PPP, Presiden didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki langsung menuju Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menghadiri Rapimnas PAN yang tengah konsolidasi menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2017. Pada Sabtu (12/11), Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghadiri Silaturahmi Nasional Ulama Rakyat yang digelar PKB di Ancol, Jakarta Utara.

Di tiga tempat ini, Presiden menjelaskan persoalan yang sama, yakni terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Persoalan ini memuncak bersamaan demonstrasi 4 November oleh ratusan ribu orang yang menuntut agar Basuki segera diproses hukum.

Media sosial

Seusai peristiwa itu, sepekan terakhir terjadi perdebatan memanas di media sosial yang menjadi keprihatinan Presiden. Presiden tidak banyak memberikan komentar, hanya menggeleng-gelengkan kepala. Selebihnya, Presiden mengajak semua elemen bangsa menjaga Pancasila yang memberikan ruang pada kemajemukan.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy berusaha menghibur Presiden dalam pidato selama sekitar 45 menit. Menurut Romi, dinamika sosial politik yang terjadi saat ini hal yang wajar dalam negara demokrasi. "PPP sudah kenyang dengan dinamika seperti itu dua tahun terakhir. Saya pastikan PPP

terus mengawal Presiden dan proses hukum yang berjalan," kata Romi.

Dari Asrama Haji Pondok Gede, Presiden menuju ke Hotel Bidakara. Suasana Rapimnas PAN cukup dinamis, terutama berkait kasus Basuki tersebut.

Sebelum Presiden Jokowi tiba, para peserta Rapimnas PAN bersuara lantang mempersoalkan kasus Basuki. Kasus Basuki menjadi salah satu pokok pembahasan dalam sambutan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir, yang direspons keras oleh hadirin. Zulkifli pun menyerukan agar aparat hukum memproses kasus tersebut secara cepat dan tegas.

Menjelang kehadiran Presiden Jokowi, Soetrisno meminta para peserta lebih santun. "Kalau Presiden datang, kita harus tenang, harus menghormati beliau. Jaga marwah kita di hadapan Presiden. Ingat jaga kehormatan partai kita di depan Presiden," pintanya.

Ternyata, instruksi itu dijalankan dengan baik. Ketika Presiden Jokowi tiba, para peserta cenderung tenang dan lebih lembut. Mereka pun mendengarkan dengan saksama sambutan Presiden Jokowi. Bahkan, mereka mengapresiasi sikap Presiden Jokowi ketika menyatakan tidak akan melindungi Ahok dan mengintervensi kasus Ahok.

"Hidup Presiden!" pekik para peserta diiringi tepuk tangan meriah. Presiden pun kemudian meninggalkan tempat acara diantar oleh Zulkifli, Soetrisno, dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Setelah Presiden meninggalkan tempat acara, Ketua Mahkamah Kehormatan PAN Amien Rais pun muncul. Salah satu tokoh reformasi itu kemudian menyampaikan pandangannya yang pesimistis kasus Basuki akan ditangani. Amien cenderung sinis dengan komitmen Presiden Jokowi dan sangat menentang sikap Basuki.

Didoakan

Sikap Presiden dalam kasus Basuki tidak berubah. Saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ulama Rakyat yang digelar PKB di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu lalu, Presiden menegaskan, dia tidak akan mengintervensi proses hukum kasus Basuki.

”Proses hukum ini memerlukan waktu. Jadi, mari kita tunggu proses hukum seperti apa, jangan aparat hukum kita paksa-paksa. Ketentuan hukumnya juga sudah ada,” kata Presiden.

Dalam pertemuan bertema ”Doa untuk Keselamatan Bangsa” tersebut, kedatangan Presiden disambut lantunan shalawat badar oleh sedikitnya 5.000 ulama dan santri yang hadir.

Tepuk tangan dan gelak tawa juga kerap terdengar saat mereka menyimak sambutan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden Jokowi, yang sesekali menyelipkan humor.

Muhaimin, misalnya, berpantun di sela-sela sambutannya. ”Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senangya kapan?” kata Muhaimin.

Muhaimin mengingatkan, kerja keras secara fisik tidaklah cukup untuk membangun bangsa. Menurut dia, kerja keras juga harus diisi dengan doa-doa. ”Hari ini para kiai hadir dari seluruh Indonesia untuk mendoakan semoga Pak Presiden Jokowi diberikan kekuatan dan keberhasilan memimpin bangsa agar menjadi bangsa yang sejahtera,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi program Nusantara Mengaji yang digelar PKB. Menurut Presiden, infrastruktur batiniah seperti yang diungkapkan Muhaimin juga penting. Saat ini, pemerintah masih fokus membangun infrastruktur fisik.

”Tadi, kan, tanya kapan senangya?” ujar Jokowi sambil tersenyum. ”Saya kalau sudah disinggung, saya juga punya perasaan, kok. Ya, nanti bicara berdua saja lah, tidak usah diungkap di sini, nanti ribuan jemaah yang hadir tahu,” kata Jokowi melanjutkan pernyataannya. Bukan hanya ulama dan santri, Muhaimin yang duduk di sebelah mimbar pun tertawa.

Presiden mengingatkan, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa dan menghargai kebinekaan. ”Tugas kita bersama merawat dan menjaga prinsip-prinsip dalam Pancasila tetap utuh,” kata Presiden.

Sebuah kebetulan, ketiga partai tersebut merupakan partai pendukung pemerintah bersama Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, dalam Pilkada DKI Jakarta, PKB, PAN, dan PPP tidak mendukung kandidat yang sama dengan empat parpol anggota koalisi lainnya. (ANDY RIZA HIDAYAT/ADRIAN FAJRIANSYAH/ANITA YOSSIHARA)

24. KOMPAS(Nasional) - Senin, 14 Nov 2016 Halaman: **03** Penulis: **SAN; APA; DRI**

Hasil Penyelidikan Segera Diumumkan

Kompolnas dan Komisi III DPR Akan Mengawasi

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI memastikan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama rampung pada pekan ini. Hasil penyelidikan akan diumumkan pada Rabu (16/11).

Terkait dengan pelaksanaan gelar perkara, Bareskrim telah mengirimkan undangan resmi kepada seluruh pihak, seperti pelapor, terlapor, saksi, ahli, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto menyatakan, gelar perkara

sudah disiapkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim yang menangani kasus tersebut. Pemeriksaan sejumlah pihak pun sudah dianggap mencukupi untuk proses penyelidikan.

”(Permintaan keterangan) Sudah mencukupi. Kami sudah siap (melaksanakan gelar perkara) dan undangan pun telah dikirimkan kepada pihak yang diundang untuk menghadiri gelar perkara, Selasa (15/11),” kata Agus, Minggu (13/11), di Jakarta.

Gelar perkara menurut rencana akan dilaksanakan di Ruang Pejabat Utama (Rupatama) Markas Besar Polri, Jakarta.

Hingga saat ini, Bareskrim telah meminta keterangan 66 orang, terdiri dari 38 ahli dan 28 saksi pelapor dan terlapor. Dari total 38 jumlah ahli, 14 orang adalah ahli agama, 11 orang merupakan ahli bahasa, 8 orang ahli pidana, 2 ahli antropologi, serta masing-masing satu orang ahli psikologi, ahli forensik, dan jurnalistik.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menambahkan, pada saat gelar perkara, penyidik akan mempersilakan terlapor dan pelapor menyaksikan kegiatan itu. Kopolnas, Kejagung, dan DPR juga secara terbuka mengawasi proses itu.

"Berbagai proses itu akan dicatat dalam notulensi, kemudian para undangan juga dipersilakan memberikan keterangan kepada media. Tetapi, secara resmi kesimpulan penyelidikan kasus itu akan diumumkan pada Rabu oleh Kepala Bareskrim Polri," ujar Boy.

Terkait dengan gelar perkara yang batal disiarkan secara langsung di televisi, Boy mengatakan, itu diputuskan berdasarkan pertimbangan Polri seiring masukan dari sejumlah pihak. Pengumuman kesimpulan penyelidikan kasus itu juga direncanakan dilakukan di Rupatama Mabes Polri.

Siap hadir

Sekretaris Kopolnas Bekto Suprpto mengatakan, meskipun gelar perkara biasanya dilakukan tertutup, Kopolnas mendukung pelaksanaan gelar terbuka dalam kasus tersebut. Bekto pun memastikan pihaknya akan hadir dalam gelar perkara itu.

"Kopolnas sangat berkepentingan penyidik Polri bekerja profesional dan mandiri. Karena itu, tiga anggota Kopolnas dipastikan hadir, yaitu saya sendiri bersama Pak Andrea Poeloengan dan Ibu Poengky Indarti," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku belum menerima undangan resmi dari kepolisian. "Namun, walaupun dibutuhkan, kami

siap hadir. Akan ada tim yang terdiri atas perwakilan setiap fraksi di Komisi III dan akan dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi III," tambahnya.

Menurut Bambang, kehadiran Komisi III sebatas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan melihat sejauh mana polisi bekerja. Pasalnya, kepolisian merupakan mitra kerja Komisi III DPR.

Ketika ada yang mengganjal dari pemeriksaan kasus tersebut, tambahnya, Komisi III akan mempertanyakannya dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Polri. Pihaknya akan memprioritaskan rapat dengar pendapat itu sesuai masa reses DPR 15 November 2016.

Menurut Bambang, pihaknya memahami posisi sulit Kapolri saat ini. Untuk itu, Komisi III DPR mendesak Kapolri bekerja berdasarkan semata fakta-fakta hukum yang ada. "Tidak perlu takut dan tunduk, baik kepada tekanan publik maupun tekanan kekuasaan," ujarnya.

Perkara dugaan penistaan agama itu didasari pidato Basuki di Kepulauan Seribu pada akhir September. Sebanyak 12 laporan diterima kepolisian. Para pelapor menduga Basuki telah melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Boy mengatakan, andai hasil penyelidikan memutuskan telah terjadi pelanggaran pidana, maka Bareskrim akan meningkatkan penanganan kasus menjadi penyidikan dan menetapkan terlapor sebagai tersangka. Namun, ketika penyidik memastikan tidak ada tindak pidana, maka Bareskrim akan menutup kasus itu.

Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang tidak akan mengintervensi proses hukum dalam perkara tersebut. Karena itu, pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. **SAN/APA/DRI**

Keyakinan Penyidik Jadi Dasar

Jaga Independensi Polri, Komisi III DPR Tak Hadiri Gelar Perkara

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa ini, menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Keyakinan penyidik akan menjadi dasar utama kepolisian menetapkan kesimpulan dalam kasus ini.

Penyidik perlu mendengar semua keterangan para saksi dan ahli, terutama di bidang agama, hukum, dan bahasa, untuk memberikan pemahaman utuh terkait pidato Basuki di Kepulauan Seribu, September lalu.

”Hasil gelar perkara akan kami analisis sehingga bisa menjadi dasar penyidik mengambil sikap berdasarkan keyakinan mereka. Kami (penyidik) memiliki otoritas sendiri, hak, dan wewenang untuk memberikan rekomendasi dalam penyelidikan kasus ini,” ujar Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto di Markas Komando Brigade Mobil Polri, Depok, Jawa Barat, Senin (14/11).

Ari menambahkan, penyidik akan secara cermat menilai keterangan sejumlah saksi dan ahli yang berbeda. Ari akan memimpin langsung gelar perkara yang dimulai, Selasa ini sekitar pukul 09.00, di Ruang Pejabat Utama Mabes Polri. Kesimpulan hasil penyelidikan akan diumumkan Rabu besok atau Kamis.

Terkait teknis gelar perkara, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menerangkan, perwakilan pelapor dari 11 laporan akan diberi kesempatan memberi penjelasan mengenai materi laporannya. Kemudian saksi dan ahli secara bergiliran akan memberikan penjelasan terkait kasus itu berdasarkan perspektif keilmuan masing-masing. Tim penyidik, kata Boy, akan mencatat semua keterangan saksi dan ahli itu. Saksi dan ahli yang telah diundang dan dipastikan hadir berjumlah sekitar 20 orang.

Sepakat tidak hadir

Komisi III DPR yang sebelumnya menyatakan siap menghadiri undangan Kapolri guna melihat gelar perkara kasus Basuki, kini memilih tidak memenuhi undangan itu.

”Tanpa mengurangi rasa hormat, kami sepakat tidak hadir untuk menjaga independensi kepolisian,” ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Menurut dia, sebagai lembaga politik, DPR tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan partai politik di dalamnya. Komisi III berpandangan, pengawasan lebih baik dilakukan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD, serta Peraturan Tata Tertib DPR.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengatakan, Presiden Joko Widodo, melalui serangkaian safari dan silaturahmi ke berbagai pihak, ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa proses hukum yang sedang berjalan terhadap Basuki tidak boleh ditekan oleh pihak mana pun.

Menurut Pramono, pesan Presiden jelas dan tegas, tidak ingin melindungi atau mengintervensi proses hukum yang saat ini diramaikan publik.

”Negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan pada tekanan kekuatan politik siapa pun yang melakukan itu,” kata Pramono.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, konsolidasi Presiden dengan TNI, Polri, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan Islam dan kalangan pondok pesantren untuk memperkuat persatuan semua komponen bangsa agar Indonesia aman dan terhindar konflik.

”Itu sesuatu yang sangat baik, mengkonsolidasikan kekuatan nasional untuk bersatu,” kata Kalla.

Presiden hari ini akan kembali bertemu dengan sejumlah kesatuan TNI. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan mengatakan, Presiden dijadwalkan bertemu prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.

Secara terpisah Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengingatkan, perbedaan yang diwariskan para pendiri bangsa adalah rahmat atau kekayaan yang tidak perlu dipaksakan untuk diseragamkan. ”Mari kita rawat NKRI, yang menurut Bung Karno sebagai taman sari keragaman yang bunga-bunganya indah dan mengharumkan,” kata Romahurmuziy sewaktu menerima rekomendasi hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional PPP, kemarin.(SAN/APA/OSA/NTA/NDY)

Polri Umumkan Hari Ini

Masyarakat Diminta Percaya Hasil Gelar Perkara

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Polri mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (16/11) ini sekitar pukul 10.00. Masyarakat pun diminta memercayai hasil gelar perkara itu.

Pelaksanaan gelar perkara berlangsung hari Selasa sejak pukul 09.40 dan berakhir sekitar 18.20. Setelah itu, sekitar pukul 18.30 hingga 20.00, penyidik Bareskrim Polri mengadakan rapat internal guna merumuskan kesimpulan penyelidikan perkara tersebut akan diumumkan hari ini.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menjadi Ketua Gelar Perkara dengan Staf Ahli Manajemen Kepala Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Arief Sulistyanto dan Gubernur Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Irjen Sigit Tri Hardjanto sebagai Wakil Ketua.

Gelar perkara dimulai dengan penyidik Bareskrim membacakan rincian laporan masyarakat terkait perkara itu. Kemudian penyidik mempersilakan para ahli untuk memberikan keterangan secara bergiliran.

”Kami masih dalam proses perumusan. Kami menampung sejumlah keterangan dari gelar perkara untuk menyusun kesimpulan yang akan kami sampaikan Rabu pukul 10.00 di Mabes Polri,” kata Ari.

Bareskrim menghadirkan tiga ahli dalam gelar perkara ini, yaitu ahli pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji dan Eva Achjani Zulfa, serta ahli pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej.

Gelar perkara juga dihadiri lima pelapor, yaitu Novel Chaidir Hasan, Syamsu Hilal, Irena Handono, Muchsin Alatas, dan Pedri Kasman. Pelapor pun menyertakan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab; pakar pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakkir; dan ahli bahasa Universitas Mataram, M Husni Muadz.

Sementara itu, Basuki sebagai terlapor diwakili pengacara Sirra Prayuna dan sejumlah ahli, yaitu Noer Aziz, Djisman Samosir (pidana), Umar Muslim (bahasa), Saadullah Affandi dan Ishomuddin (agama).

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, berharap, masyarakat menghormati proses hukum dan tidak mudah terprovokasi dengan berbagai hasutan di media sosial.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono juga meminta masyarakat untuk memercayakan gelar perkara kasus ini kepada kepolisian. Ia meminta masyarakat tetap menjaga situasi supaya tetap nyaman dan aman.

Hormati Proses Hukum

Pencalonan Basuki di Pilkada DKI Tidak Gugur

JAKARTA, KOMPAS — Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tak

gugur dan tak dibatalkan meski yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Basuki tetap dapat mengikuti semua tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pencalonan Basuki sebagai gubernur baru gugur jika ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.

Ketentuan ini, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno, Rabu (16/11), di Jakarta, ada di Pasal 88 Huruf B Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan.

Kemarin, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, di Gedung Ruang Pejabat Utama Mabes Polri, Jakarta, mengumumkan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Penetapan Basuki sebagai tersangka ini berdasarkan alat bukti video pidato Basuki di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu, sejumlah dokumen, dan keterangan sejumlah ahli yang menilai perkara ini perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Terkait penyidikan kasus ini yang akan dimulai pekan depan, Basuki dicegah bepergian ke luar negeri. Namun, menurut Ari Dono, penyidikan kasus ini tidak akan mengganggu kegiatan Basuki di Pilkada 2017.

Diapresiasi

Secara terpisah dalam pernyataan bersama yang kemarin dibacakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, sedikitnya 22 perwakilan ormas dan lembaga Islam mengapresiasi putusan langkah Polri dalam kasus Basuki. Apresiasi juga diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mengintervensi kasus tersebut. Selanjutnya, mereka akan mengawal jalannya proses hukum terhadap Basuki.

Dengan penetapan status tersangka kepada Basuki, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia

Din Syamsuddin yang hadir di acara itu mengimbau umat Islam agar tidak melakukan aksi-aksi lanjutan, termasuk dengan adanya rencana Aksi Bela Islam, 25 November. Umat diharapkan sabar menanti proses hukum.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua elemen bangsa tidak terpecah karena kasus ini.

Sementara itu, Basuki menyatakan menerima penetapan dirinya sebagai tersangka. Basuki dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, juga menyampaikan terima kasih kepada ulama, tokoh masyarakat, dan warga yang turut mewujudkan Jakarta yang damai. Keduanya menyerahkan penanganan kasus ke kepolisian dan tim kuasa hukumnya.

Koordinator tim hukum Basuki, Sirra Prayuna, menyatakan, timnya tidak mengajukan praperadilan terkait penetapan Basuki sebagai tersangka. Praperadilan dinilai hanya akan menguras energi dan waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk berinteraksi dengan warga DKI.

Tak berpengaruh

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pencalonan Basuki sebagai gubernur baru gugur jika pengadilan menjatuhkan vonis pidana kepadanya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. "Meski vonisnya di bawah 5 tahun, tetapi kalau tindak pidananya diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih, calon tetap akan digugurkan," kata Sumarno.

Jika vonis jatuh sebelum hari pemungutan suara, parpol pengusung masih mungkin mengajukan calon pengganti. Calon pengganti diajukan paling lambat 30 hari sebelum hari-H pemungutan suara. Ini berarti paling lambat 15 Januari 2017 karena pemungutan suara Pilkada 2017 dilakukan 15 Februari.

"Jika calon gubernur terpilih dan status hukumnya berubah menjadi terpidana, otomatis dia akan diberhentikan. Lalu, wakil gubernur terpilih akan naik menjadi gubernur," kata Sumarno.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Basuki juga tak boleh mundur sebagai calon gubernur karena saat ini dia sudah resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Pasangan calon yang mundur setelah penetapan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 24-60 bulan dan denda Rp 25 miliar-Rp 50 miliar. Besar sanksi yang sama juga dikenakan terhadap pimpinan parpol atau gabungan parpol yang menarik pasangan calonnya setelah pasangan calon itu ditetapkan. Ketentuan ini ada di Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di pilkada DKI kali ini, pasangan Basuki-Djarot diusung oleh PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Hanura.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya tetap berkomitmen terhadap pasangan Basuki-Djarot. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga menegaskan, partainya tetap mendukung penuh Basuki-Djarot.

Anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Fayakhun Andriadi dari Partai Golkar mengatakan, tim pemenangan beserta pasangan calon

akan fokus melakukan sosialisasi dan membina komunikasi dengan masyarakat.

Calon gubernur DKI nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan, tak ada keuntungan ataupun kerugian bagi dirinya sejak Basuki ditetapkan sebagai tersangka. Saat ditemui ketika berkampanye di Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Agus juga menuturkan, sebaiknya masyarakat Jakarta menyerahkan kasus Basuki ke proses hukum.

Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menyatakan, penetapan Basuki sebagai tersangka merupakan persoalan hukum. "Proses hukum ini biarlah tetap jalan. Kami tetap konsentrasi pada pilkada, tidak ada kaitannya," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menampik, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung partainya diuntungkan secara tidak langsung dengan penetapan Basuki sebagai tersangka. (DEA/IRE/MDN/MKN/GRE/MAM/BKY/EN G/HRS/SAN/ONG/INA/AGE/IAN/REK/NTA/NDY)

28. **KOMPAS(Nasional) - Kamis, 17 Nov 2016** Halaman: **02** Penulis: **M Subhan SD**

CATATAN POLITIK & HUKUM Aktor Politik

Oleh **M SUBHAN SD**

Pekan-pekan ke depan diharapkan terbangun kembali suasana kondusif, melupakan pekan-pekan yang sangat melelahkan. Rabu (16/11) kemarin, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama, diumumkan sebagai tersangka oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. Basuki pun meminta pendukungnya menerima dan mengikuti peradilan.

Basuki memang aktor politik yang kerap mengundang kontroversi sejak menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden pada 2014. Puncaknya adalah aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November lalu saat umat Islam menuntut pengusutan Basuki yang diduga menista agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu, September lalu. Presiden Jokowi diminta tidak melindungi Basuki.

Secepatnya Presiden Jokowi pun menjamin takkan melindungi Basuki. Presiden berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum. Ketika merespons unjuk rasa yang berujung rusuh itu, Presiden Jokowi pun menyebutkan, ada aktor politik yang memanfaatkan aksi unjuk rasa. Kontan saja, banyak orang, maksudnya politikus, kebakaran jenggot. Ada yang menilai pernyataan itu sebagai reaksi kepanikan presiden.

"Aktor politik" rasanya istilah baru yang dikaitkan dengan aksi unjuk rasa. Biasanya istilah yang muncul seiring unjuk rasa atau kerusuhan adalah "aktor intelektualis". Secara leksikal, aktor intelektualis bermakna "otak berbagai tindakan yang menyimpang (seperti kerusuhan, pembakaran, pembunuhan)". Kira-kira *mastermind* di balik suatu peristiwa. Apakah aktor politik sama dengan aktor intelektualis, entahlah.

Agak jelas saat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Istana, Jakarta, Selasa (8/11), bilang, "Kita lihat memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk ke dalam arena demonstrasi. Ya, itu sudah terjawab."

Sederhananya bisa dipilah begini: di arena demonstrasi itu ada "massa", "aktor non-politik", dan "aktor politik". Aktor politik pastilah orang-orang yang aktif di panggung politik. Mereka punya kendaraan partai politik (parpol).

Kalau demikian, Basuki itu jelas aktor politik. Sebab, lama aktif di tiga parpol (PIB, Golkar, Gerindra), pernah menjadi bupati, pernah menjadi anggota parlemen. Dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, yang terlihat berdemonstrasi, juga aktor politik. Fahri politikus PKS dan Fadli politikus Gerindra. Keduanya kini memimpin DPR, parlemen resmi dalam sistem demokrasi (legislatif). Menarik juga jika mereka turun di "parlemen jalanan". Mungkinkah arena DPR kurang menarik lagi?

Ternyata, ini fakta lain, anggota DPR makin malas menghadiri rapat-rapat termasuk rapat paripurna (*Kompas*, 11/11). Pada rapat paripurna masa sidang I antara 16 Agustus dan 28 Oktober, rata-rata kehadiran anggota DPR cuma 41,79 persen. Jadi hanya 234 yang hadir dari 560 anggota DPR.

Jadi, jelas bahwa aktor politik itu, ya, politikus. Namun, jika maksud Presiden Jokowi adalah pelaku yang memanfaatkan aksi unjuk rasa tentu perlu penyelidikan lebih lanjut. Apalagi sekarang ini banyak aksi saling lapor ke polisi yang membuat suasana makin gaduh. Biarlah hukum bekerja. Mari membangun suasana yang adem dan rukun.

Karena proses hukum sedang bekerja, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pun mengingatkan untuk tidak berdemonstrasi lagi. "Kalau ada yang *ngajak* turun ke jalan lagi, apalagi membuat keresahan dan keributan, cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional dan kita harus melawan itu karena negara ada langkah-langkah inkonstitusional," kata Tito.

Kalau pada zaman Orde Baru mungkin beda lagi ceritanya. Tahun 1989 sepulang dari kunjungan ke Yugoslavia, saat menanggapi isu-isu suksesi, Presiden Soeharto menegaskan, "Biar jenderal atau menteri yang inkonstitusional akan saya gebuk."

Untunglah sekarang kita hidup pada zaman demokratis.

29. KOMPAS(Nasional) - Jumat, 18 Nov 2016 Halaman: 05

SILATURAHIM JOKOWI-PRABOWO

Pesan Persatuan dari Beranda Istana

Dua pekan lebih setelah Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah kediamannya di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Prabowo juga membalas kunjungan ke kantor Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Di beranda belakang Istana Merdeka, yang menghadap taman rumput di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/11), keduanya duduk di sofa kayu coklat muda. Jokowi yang mengenakan kemeja batik berwarna kombinasi coklat dan biru, duduk di sisi kanan. Sementara Prabowo dengan kemeja putih lengan pendek duduk di sebelah kiri.

Keduanya terlihat akrab, berbincang-bincang sambil menyeruput teh manis hangat. Sambil merasakan hangat dan aroma tehnya, Jokowi dan Prabowo sesekali tersenyum bersama dan memandang asrinya taman rumput Istana Kepresidenan yang terawat rapi.

Seperti dalam suasana pertemuannya yang terakhir pada Senin (31/10) lalu di Bukit Hambalang, Jokowi-Prabowo sama sekali tidak terlihat rivalitas. Padahal, keduanya, pernah bersaing ketat sebagai calon Presiden RI pada kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dua tahun lalu.

Dari pertemuan yang keempat kalinya setelah keduanya mengakhiri kontestasi Pilpres 2014 dengan aman dan damai, publik kini dapat melihat bagaimana sebuah rivalitas yang pernah terjadi di antara kedua elite politik ternyata hanya terjadi dalam panggung politik lima tahun sekali saja. Selebihnya, kedua pemimpin tersebut adalah sosok manusia yang saling membutuhkan dan mendambakan Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera, juga damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat tanya jawab dengan pers di beranda belakang tersebut, keduanya sekali lagi menegaskan sikap dan komitmen bersamanya untuk menjaga kebinekaan dan keutuhan NKRI. Selain juga tentunya berdiskusi

mengenai berbagai hal, termasuk perkembangan perekonomian global.

"Hari ini, saya bertemu kembali dengan Bapak Prabowo di Istana. Ini kunjungan balasan beliau. Saya kira, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan, saya berharap, budaya seperti ini juga sampai ke tengah, dan sampai ke bawah (masyarakat)," kata Presiden Jokowi mengawali tanya-jawab dengan pers.

Sebaliknya, Prabowo membalas, "Saya memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan. Sebuah kehormatan yang beliau berikan kepada saya ketika datang ke Hambalang. Kali ini, saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang ikan bakar. Jadi, kalau di Hambalang (kita makan) nasi goreng, di sini (Istana) (makan) ikan bakar."

Keduanya pun lantas tertawa. Keakraban itu memang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, sejak pukul 13.37 sampai 14.40. Sebelum minum teh di beranda belakang Istana, keduanya menikmati makan siang di ruang makan Presiden di Istana Merdeka. Khusus untuk Prabowo, Jokowi memesan petugas jamuan Istana membuat ikan bakar.

Prosedur biasa

Dalam catatan *Kompas*, dua dari empat pertemuan dengan Presiden Jokowi, Prabowo hadir saat situasi sosial politik gaduh. Saat bertemu dengan Jokowi pada 29 Januari 2015 di Istana Bogor, saat itu tengah terjadi polemik antara KPK dan Polri menyusul pencalonan Kapolri.

Pertemuan kedua, akhir Oktober lalu, terjadi menjelang aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan

penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (4/11) lalu, Presiden Jokowi juga menemui Prabowo. Namun, setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014, Jokowi juga menemui Prabowo di rumahnya di Kebayoran Baru, pada 17 Oktober 2014.

Meskipun jadi tamu istimewa Presiden, Prabowo mengikuti prosedur biasa. Hal ini berbeda dengan saat Presiden Jokowi ke rumah Prabowo di Bukit Hambalang. Jokowi mengikuti berbagai seremoni di antaranya upacara penyambutan dengan parade musik. Kali ini, Prabowo justru masuk dan keluar lewat pintu tamu biasa, yaitu ruang kaca Sekretariat Negara, yang menghubungkan kompleks Istana Kepresidenan dengan Setneg. Saat Prabowo masuk, tak ada jurnalis yang tahu karena sebagian jurnalis diarahkan lebih dulu masuk ke Kantor Presiden. Saat pulang, Prabowo diantar Menteri Setneg Pratikno naik mobil golf dan keluar kembali lewat pintu yang sama.

Prabowo tercatat, sedikit dari tamu Presiden yang diajak minum teh di beranda Istana Merdeka. Biasanya, hanya tamu yang dianggap dekat dan penting dapat berbincang-bincang sambil minum teh di beranda tersebut. Perbincangan Presiden dengan tamu di beranda merupakan konsep baru sejak era Presiden Jokowi. Kalangan istana menyebutnya, Veranda Talk.

Salah satu tamu yang pernah berbincang di beranda Istana adalah Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti, beberapa waktu lalu. Saat menegaskan soliditas pemerintah menjelang aksi 4 November lalu, Presiden juga mengajak Wapres Jusuf Kalla berbincang di beranda Istana Merdeka. Tentu, setelah Jokowi-Prabowo bertemu, harapannya, pesan persatuan benar-benar sampai di masyarakat. (NTA/NDY/HAR)

KEBANGSAAN

Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Doa bersama dilakukan oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan masyarakat di sejumlah tempat di Indonesia, Jumat (18/11). Selain untuk keamanan dan kedamaian Indonesia, acara ini juga untuk menciptakan rasa tenang setelah terjadi dinamika politik dalam negeri belakangan ini.

Di Jakarta, istigasah digelar di Monumen Nasional, Jakarta. Istigasah ini dihadiri oleh sedikitnya 25.000 anggota TNI, 3.000 anggota Polri, 5.000 anak yatim, dan 3.000 anggota kelompok pengajian. Istigasah juga dilakukan oleh sekitar 1.000 anggota Kodam III Siliwangi bersama masyarakat di Masjid Al-Ikhlas, Markas Kodam III Siliwangi, di Bandung, Jawa Barat.

Doa bersama kemarin juga dilakukan di tempat ibadah di Jakarta, yakni di Gereja Katedral, Gereja Immanuel Gambir, Gereja HKBP Cililitan, GKI Kwitang, dan Pura Mustika Dharma Cijantung.

Sementara itu, ribuan umat Buddha melakukan doa bersama dan donor darah di Medan, Sumatera Utara. Acara yang bertajuk "Untuk Negeriku Indonesia" ini juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Pertemuan

Presiden Joko Widodo kemarin siang mengundang pimpinan lembaga pertahanan dan keamanan di Istana Merdeka, Jakarta.

Mereka yang datang antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, kepala staf tiga angkatan di TNI, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksana, serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Kapolri, kepala staf tiga angkatan di TNI, dan Kepala BIN keluar Istana Merdeka pukul 15.49. Adapun Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Panglima TNI terlihat keluar Istana Merdeka pukul 16.19. Sementara Menko Polhukam baru keluar dari Istana Merdeka pukul 16.29.

Tak ada satu pejabat pun yang bersedia menjelaskan materi yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. Menko Polhukam hanya menjelaskan materi yang dibahas di pertemuan itu disesuaikan dengan bidang tugas yang diembannya.

Keamanan Indonesia

Sebelum rapat dengan Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf TNI AD, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya menghadiri istigasah di Monas yang berlangsung pukul 07.30-09.00.

Istigasah itu berlangsung khuyuuk. Peserta diajak merenungi kondisi Indonesia saat ini. Ketika berdoa, semua peserta hening dan memejamkan mata. Tak sedikit peserta yang meneteskan air mata saat para ulama melantunkan doa untuk kemaslahatan Indonesia.

Gatot mengatakan, istigasah ini untuk mendoakan keamanan Indonesia. "Kita semua berharap dan berdoa Indonesia bisa damai sampai kapan pun," ujarnya.

Ketika ditanya apakah istigasah ini juga untuk menenangkan masyarakat setelah sejumlah dinamika yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir, Gatot menjawab, hal itu termasuk, tetapi bukan tujuan utama. "Intinya, istigasah ini mendoakan Indonesia agar selalu damai dan ungkapan syukur kepada para pahlawan. Apalagi kita baru saja memperingati Hari Pahlawan pada 10 November," ujarnya.

Kapolri menyatakan, istigasah ini menjadi wadah berdoa agar Indonesia tetap kondusif menjelang pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia pada 15 Februari 2017. Ia menilai, pilkada bisa memicu kerentanan berupa gesekan antarmasyarakat. "Untuk itu, kita perlu bersiap sejak dini agar pilkada berlangsung damai dan kondusif. Lewat istigasah ini diharapkan masyarakat bisa tenang," katanya.

Kemarin, Kapolri juga mendatangi gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian melakukan pertemuan dengan petinggi MUI.

"Kedatangan ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan MUI. Saya juga

perintahkan jajaran di wilayah untuk intens berhubungan dengan ormas Islam sebab komunikasi dan dialog seperti ini merupakan langkah untuk menjaga stabilitas keamanan negara,” ujar Kapolri sesuai bertemu dengan petinggi MUI yang dipimpin Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin selama 1,5 jam.

Dalam pertemuan, kata Kapolri, dirinya juga memberi informasi kepada MUI terkait perkembangan penyidikan kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja

Purnama. Ia memastikan, Polri akan menyelesaikan penyidikan kasus itu dan kemudian melimpahkan berkas penyidikan ke jaksa.

Ma’ruf pun mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan Polri. ”Kami mendukung langkah Polri dan akan mengawasi sampai proses penyidikan selesai. Kami tekankan masalah Pak Ahok (Basuki) murni masalah hukum. Jadi, tak ada kaitannya dengan etnis atau agama tertentu,” ujarnya.(DRI/SAN/OSA/SEM/NTA/SON/NSA/ONG)

31. KOMPAS(Nasional) - Senin, 21 Nov 2016 Halaman: 02 Penulis: DRI; REK

Perluas Konsolidasi

Megawati Soekarnoputri Bertemu Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan pimpinan partai politik, seperti antara Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dapat memberi nuansa sejuk di masyarakat. Pertemuan itu perlu diperluas dengan melibatkan parpol yang beda posisi politik.

Megawati dan Novanto, Minggu (20/11), bertemu selama sekitar dua jam, dari pukul 13.00 hingga 15.00 di rumah Megawati di kawasan Menteng, Jakarta. Sejumlah pengurus inti PDI-P dan Golkar turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kamis pekan lalu, Novanto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantornya. Persoalan kebangsaan dan kesinergian membangun keutuhan bangsa jadi tema utama pembicaraan di pertemuan itu. ”Kami berharap pada sesama parpol untuk lebih serius menjaga keutuhan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu masih memerlukan penguatan,” kata Surya, sesuai pertemuan itu (*Kompas*, 18/11).

Seusai bertemu Megawati, Novanto menuturkan, pertemuan kemarin tersebut merupakan pertemuan resmi pertama antara pengurus inti Golkar dan PDI-P setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Mei 2016. Pertemuan tersebut kelanjutan dari komitmen Golkar yang menyatakan menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

”Sebagai partai yang menyatakan mendukung pemerintah, kami butuh wejangan dari PDI-P yang telah menjadi partai pendukung pemerintah paling awal, terutama dari Ibu Megawati yang merupakan Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden kelima Indonesia,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Novanto, Golkar dan PDI-P membahas sejumlah isu sosial politik, seperti teror bom dan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama yang kini tengah diproses hukum.

”Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, kami akan mengawal pemerintahan dalam menjalani setiap masalah agar kebinekaan ataupun kemajemukan Indonesia selalu terjaga. Setidaknya, kami bersama (Golkar dan PDI-P) akan memberikan ketenangan dan komitmen untuk mewujudkan kondisi damai, aman, dan tenteram di Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, dinamika sosial politik yang dialami Indonesia patut diselesaikan dengan bijaksana, terutama dengan jalan musyawarah. Atas dasar itu, pihaknya mengajak sejumlah partai politik, terutama pendukung pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi atas dinamika sosial politik yang sedang terjadi di Indonesia.

”Indonesia ini dibangun dengan perjuangan yang panjang. Ketika ada konflik, pasti rakyat yang sengsara dan menderita. Karena itu, semangat musyawarah harus kita kedepankan dan komitmen terhadap jalur hukum karena kita adalah negara hukum. PDI-P dan Golkar menyepakati itu,” katanya.

Suasana sejuk

Pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menuturkan, pertemuan antar-pimpinan parpol seperti yang dilakukan Megawati, Novanto, dan Surya

Paloh dapat memberikan nuansa sejuk di tengah dinamika sosial politik Indonesia saat ini.

Gun Gun berharap, pertemuan serupa dilakukan oleh partai politik pendukung pemerintah dan parpol di luar pemerintahan, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Konsolidasi antarpol lintas kepentingan akan jauh lebih efektif dan bermanfaat menumbuhkan rasa percaya diri di tengah masyarakat bahwa para elite tetap berupaya menjaga persatuan," katanya.

Pemerhati politik Arbi Sanit menuturkan, pertemuan Presiden dengan Prabowo Subianto menjadi contoh nyata konsolidasi elite politik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengingatkan kembali, setiap elite politik kini harus lebih berhati-hati dalam berpendapat di ranah publik, lebih-lebih jika itu menyangkut isu-isu yang sangat sensitif.

"Sebaiknya elite politik juga mencari tema-tema yang lebih teduh dan halus, misalnya dengan datang ke majelis taklim atau pengajian. Harus berhati-hati ketika berbicara mengenai segala sesuatu yang menyangkut keimanan atau ritual tertentu supaya tidak timbul kegaduhan dan keresahan di masyarakat," katanya.

32. KOMPAS(Nasional) - Selasa, 22 Nov 2016 Halaman: 01, 15

Pererat Komunikasi Politik

Presiden Makan Siang Bersama Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo belakangan ini dinilai masih

belum cukup. Presiden masih perlu melakukan konsolidasi dengan elite politik, khususnya para ketua umum partai politik, untuk mengingatkan komitmen mereka kepada pemerintah.

Setelah unjuk rasa besar 4 November lalu terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Jokowi telah bertemu dengan tiga ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Tiga ketua umum parpol lainnya ditemui Presiden pada acara yang digelar partai itu. Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terkait pertemuan dengan pemimpin parpol tersebut, saat berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11), Megawati menyarankan Presiden Jokowi untuk melanjutkannya. "Saya meminta kepada Presiden supaya nanti ada pertemuan di antara ketua-

ketua umum parpol," ujarnya di sela-sela perbincangan bersama Presiden Jokowi di beranda belakang Istana Merdeka.

Megawati yang datang selaku presiden ke-5 RI tiba di Istana Merdeka dengan membawa mi goreng dan mi rebus untuk makan siang bersama Presiden Jokowi. Setelah makan siang bersama selama sekitar satu jam, Jokowi dan Megawati lalu minum teh bersama di beranda belakang Istana Merdeka.

Dalam kesempatan itu, Megawati menyatakan telah bertemu dengan Setya Novanto. "Beberapa hari ini saya akan bertemu juga dengan partai pendukung presiden, dan itulah permintaan saya kepada beliau (Presiden) agar berkomunikasi lagi (dengan para ketua umum parpol)," katanya.

Hari Minggu lalu, Novanto menemui Megawati di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta. Makan siang bersama dan kemudian berbincang di beranda belakang Istana Merdeka juga dilakukan Presiden dengan Prabowo pada Kamis lalu.

Hari ini Presiden dijadwalkan makan pagi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Perkuat pemerintahan

Megawati menyatakan, parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Kalla semestinya bisa memperkuat pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengusung calon yang sama di pilkada. "Waktu yang lalu saya sudah mengatakan, kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, mestinya dalam pilkada juga bersama," ujarnya.

Namun, sebagai contoh di Pilkada DKI Jakarta, parpol pendukung pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura bergabung mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tiga parpol pendukung pemerintah lain, yakni PKB, PPP, dan PAN, bergabung dengan Partai Demokrat yang selama ini menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Presiden Jokowi menanggapi positif permintaan Megawati agar ia bertemu dengan para ketua umum parpol. Ia juga menyampaikan, budaya silaturahmi harus terus dijaga karena merupakan cara efektif untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan bangsa.

Suhu politik

Presiden Jokowi mengatakan, naiknya suhu politik di daerah yang melaksanakan pilkada merupakan hal yang wajar. Namun, kondisi menjadi tidak wajar ketika ada kepentingan lain yang menunggangi. Menjadi tidak biasa pula jika ada aktor politik yang memanfaatkan situasi politik yang menghambat selama pilkada. "Yang paling penting jangan sampai merugikan NKRI, jangan melemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita, dan jangan merongrong Pancasila. Prinsipnya itu saja," kata Presiden.

Presiden juga memastikan kondisi negara, khususnya DKI Jakarta, relatif aman setelah unjuk rasa 4 November.

Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melarang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Gedung DPR/MPR pada 25 November dan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 2 Desember. Pasalnya, intelijen Polri telah memantau sejumlah rapat di sekitar Jakarta yang mengagendakan politik tertentu, yaitu menjatuhkan pemerintahan yang dibalut aksi unjuk rasa.

"Demonstrasi adalah hak konstitusi warga negara, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum yang

lebih besar. Kalau menutup jalan raya yang banyak penggunanya sehingga memacetkan Jakarta, itu tidak bisa. Pasti dilarang," ujar Tito se usai melakukan konferensi video bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin.

Panglima TNI menyatakan telah memerintahkan semua panglima komando utama TNI untuk siap melindungi masyarakat dari tindakan kelompok atau individu tertentu yang ingin mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kejadian yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang ini tidak boleh berlarut-larut. Saya telah meyakinkan prajurit saya bersama anggota Polri jangan ragu menindak tegas segelintir kelompok yang mengganggu ketenangan masyarakat," kata Gatot.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk tidak perlu kembali berunjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Pasalnya, kasus itu sudah masuk proses hukum. "MUI lebih mendorong agar proses hukum itu bisa kita kawal sehingga putusannya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid.

MUI, lanjut Zainut, sudah mengingatkan kepada kelompok yang akan berunjuk rasa agar tak menggunakan simbol MUI.

Basuki diperiksa

Terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki, Tito menjanjikan, berkas penyidikan kasus itu akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung paling lambat dua pekan mendatang. Selasa (22/11) ini, Badan Reserse Kriminal Polri untuk pertama kalinya akan memeriksa Basuki sebagai tersangka kasus itu.

Secara terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan akan bekerja cepat dalam meneliti berkas kasus Basuki jika berkas perkara itu telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Meski kini belum menerima berkas kasus Basuki, kejaksaan sudah menyiapkan tim jaksa peneliti yang dipimpin Direktur Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Ali Mukartono. "Saya sudah tunjuk biar semua pihak tahu bahwa kami tidak ada main. Semua kami lakukan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada," kata Prasetyo.**(NTA/WAD/SAN/IAN/OSA/EDN/B IL)**

SISI LAIN ISTANA Suguhan untuk Presiden

Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ulama serta pemimpin organisasi massa Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 1 November 2016. Saat itu, Presiden antara lain menyatakan tak menghalangi aksi unjuk rasa, tetapi hal itu harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan aturan.

Presiden juga meyakini, ulama selalu membawa kabar baik serta menjaga dan memberikan tuntunan kepada umat.

Beberapa hari setelah pertemuan itu, tepatnya pada 4 November, terjadi unjuk rasa besar terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah unjuk rasa itu, Presiden datang ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada 7 November 2016.

Menurut Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, ketika datang ke kantor PBNU, Presiden mendapat suguhan kacang rebus, ubi rebus, dan singkong goreng.

"Pokoknya enak-enaklah. Tapi, kami juga menyampaikan kritik yang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan pemerintah," ujar Helmy dalam pertemuan santai dengan *Kompas* di kantor PBNU, yang juga dihadiri Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Said Aqil Siroj dan Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra.

Kritik yang saat itu disampaikan para pengurus PBNU antara lain soal kesenjangan ekonomi antara orang

kaya dan miskin yang makin lebar di Indonesia serta dugaan Presiden melindungi Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Banyak hal lain yang kami sampaikan secara tertutup dan saya sendiri mempersoalkan hubungan antara NU dan pemerintah pada saat ini," kata Helmy yang keberatan disapa dengan kata "Gus". "Saya jadi *kegedean* baju nanti," ujarnya.

Sementara menurut salah satu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari, ketika datang ke kantor PP Muhammadiyah, Selasa, 8 November lalu, Presiden mendapat suguhan dodol garut, pisang rebus, dan jeruk. "Kami mengkritik soal Presiden tidak menemui para pengunjung rasa tanggal 4 November dan soal melindungi Basuki. Presiden memberi jawaban dengan terbuka dan tangkas," ujarnya.

Hajriyanto mengatakan, aksi massa 4 November sudah cukup. Salah satu catatan tentang aksi itu, katanya, umat Islam berhasil memobilisasi massa dalam unjuk rasa yang tertib dan damai. "Ini fenomenal," lanjutnya.

Siti Zuhro, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta, Minggu (20/11), memberi catatan, *blusukan* Jokowi ke organisasi massa Islam masih membutuhkan tindak konkret secara institusional. "Massa Islam masih tetap menunggu dan mengawal penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama. Dalam soal ini, orang-orang Istana, termasuk para menteri, jangan hanya memberi info ABS (asal bapak senang) kepada Pak Jokowi," kata Siti Zuhro.

Safari Politik Berlanjut

MUI: Kedepankan Diplomasi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo terus melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik. Dalam kesempatan ini, Presiden antara lain menegaskan, pemerintahannya merupakan produk demokrasi yang konstitusional sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Pada Selasa (22/11), Presiden makan pagi dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Siang harinya, Presiden bertemu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta, kemarin menerima Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ini merupakan pertemuan ketiga yang dilakukan beruntun oleh Megawati dalam tiga hari terakhir. Pada hari Minggu lalu, Megawati menerima Setya Novanto di rumahnya dan kemudian ke Istana Merdeka pada Senin untuk makan siang dengan Presiden Jokowi.

Seusai bertemu Megawati selama sekitar 80 menit, Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR menegaskan, MPR akan tetap menjadi garda terdepan penjaga konstitusi. "Saya tegaskan, MPR penjaga konstitusi. Kalau ada yang mau mengganggu konstitusi, MPR berada di paling depan," ujarnya.

Sementara itu, saat bersama Surya Paloh, Presiden mengatakan, tidak ada kekhawatiran terhadap posisi pemerintah saat ini. "Kita ini produk demokrasi yang konstitusional. Ya saya biasa-biasa saja," ujar Presiden.

Surya Paloh juga menyatakan tak sependapat jika ada keinginan melanggar konstitusi. "Jabatan beliau (Presiden Jokowi) masih berjalan, sudah ada keinginan menjatuhkan pemerintah. Kalau itu yang terjadi, masak warga negara seperti saya harus tinggal diam? Masak partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti saya harus lawan," ujarnya.

Unjuk rasa

Dalam kondisi saat ini, menurut Surya Paloh, yang diperlukan adalah kejujuran dan konsistensi. Semua pihak mesti berpikir positif dan pasti ada hikmah dari setiap kejadian. Dia lalu mencontohkan unjuk rasa pada 4 November terkait kasus dugaan penistaan

agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

Surya Paloh menegaskan, aksi 4 November itu sudah ditanggapi pemerintah dengan memproses hukum Basuki. Oleh karena itu, dia mempertanyakan apabila ada unjuk rasa lagi terkait kasus itu.

Setya Novanto, Romahurmuziy, dan Zulkifli Hasan juga menilai unjuk rasa tak perlu lagi karena proses hukum terhadap Basuki mulai berjalan.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, kemarin di Jakarta, mengatakan, terkait kasus Basuki, MUI meminta masyarakat agar tidak melakukan unjuk rasa pada 2 Desember. MUI mengimbau masyarakat agar mengedepankan langkah diplomatis kepada aparat hukum, legislatif, dan eksekutif. "Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan pernyataan sikap melalui pers atau media karena akan lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi Indonesia," ujarnya.

Jika masyarakat tetap ingin melakukan demonstrasi, kata Anwar, MUI meminta dilakukan dengan santun, tertib, damai, dan tak memakai atribut atau simbol MUI.

Sholahuddin Al-Aiyub, Wakil Sekjen MUI, mewanti-wanti agar unjuk rasa tersebut jangan sampai dimanfaatkan untuk mengganggu kebinekaan ataupun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MUI juga menyatakan, setiap upaya yang mengancam kebinekaan, NKRI, atau makar merupakan tindakan terlarang. "Hasil ijtima' (kesepakatan) ulama pada 2006 menegaskan, Indonesia adalah negara yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, pemimpin yang terpilih secara sah dan tidak melanggar konstitusi wajib ditaati. Kami tidak bisa mentoleransi apabila ada gerakan yang ingin menurunkan rezim pemerintahan yang belum habis masa jabatannya," kata Sholahuddin.

Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab mengatakan, unjuk rasa pada 2 Desember 2016 bukan untuk makar. Aksi itu untuk menuntun Basuki dihukum.

"Jangan berpikir seram dengan mengira kami akan melakukan makar. Kami hanya ingin menegakkan hukum dan keadilan. Semua pihak menginginkan kedamaian," ujar Rizieq, kemarin di Serang, Banten. Dia menambahkan, aksi akan dilakukan sampai Basuki dipenjara.

Proses hukum

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto menuturkan, penyidikan kasus Basuki telah memasuki tahap akhir. Penyidik tinggal meminta keterangan dari Rizieq Syihab yang menurut rencana dilakukan pada Rabu ini di gedung sementara Bareskrim Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Agus menyebut telah memeriksa 25 orang dalam penyidikan kasus ini, termasuk Basuki yang diperiksa kemarin. "Pekan depan (berkas perkara) sudah bisa

dilimpahkan ke Kejaksaan Agung," ujar Agus sesuai memimpin pemeriksaan terhadap Basuki.

Kemarin, Basuki diperiksa dari pukul 09.00 hingga pukul 17.30. Dalam pemeriksaan itu, Basuki didampingi Ketua Tim Pemenangan Basuki-Djarot Prasetyo Edi Marsudi, juru bicara Basuki-Djarot Ruhut Sitompul, dan Ketua Tim Kuasa Hukum Basuki-Djarot Sirra Prayuna. Selesai menjalani pemeriksaan, Basuki tidak memberikan keterangan kepada media.

Saat pemeriksaan, Basuki ditanya 27 pertanyaan. "Pak Basuki telah menyelesaikan proses penyidikan sehingga kami tinggal menunggu proses lanjutan dalam perkara ini," kata Sirra.

(WAD/HLN/BAY/COK/DRI/INA/SON/SAN/EDN/OSA/NDY/NTA)

35. KOMPAS(Nasional) - Rabu, 23 Nov 2016 Halaman: 04

KONSOLIDASI POLITIK

Membaca Pesan Presiden dari Istana

Sejak lama Guru Besar Ilmu Politik Universitas Harvard, Amerika Serikat, Samuel P Huntington mengingatkan, identitas agama dan budaya menjadi sumber ketegangan atau konflik utama di dunia setelah Perang Dingin. Jika Indonesia tak bisa mengelola ketegangan akibat persoalan agama dan budaya, pemerintah tak pernah bisa tenang.

Baru kali ini sejak dilantik sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers dini hari, Sabtu (5/11), di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menggelar konferensi pers pada Sabtu dini hari itu untuk menanggapi unjuk rasa yang digelar terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Unjuk rasa tersebut digelar sejak Jumat siang hingga malam.

Pada konteks itu, Presiden ingin memberikan pernyataan kepada publik dalam konferensi pers Sabtu dini hari. Setelah mengapresiasi aksi damai pada siang hingga maghrib, Presiden mengecam terjadinya insiden keributan dalam unjuk rasa yang terjadi sekitar pukul 19.00. Presiden menuding ada pihak-pihak yang menunggangi aksi itu hingga kemudian berakhir ricuh.

Presiden kemudian mulai melakukan konsolidasi. Presiden bahkan membatalkan kunjungan kenegaraan ke Australia demi melakukan konsolidasi ini. Pada Senin (7/11) pagi Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara di Markas Besar TNI AD di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Presiden memerintahkan prajurit TNI dan Polri tidak memberi peluang adanya gerakan yang ingin memecah belah, mengadu domba bangsa, dan memprovokasi massa.

Perintah itu juga disampaikan pada kunjungannya di depan pimpinan Polri, prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Marinir, Pasukan Khas TNI AU, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), serta personel Brigade Mobil Polri.

Presiden juga berkonsolidasi dengan pimpinan partai politik, terutama parpol pendukung pemerintah, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Konsolidasi juga dilakukan dengan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Tidak hanya itu, Presiden juga berkonsolidasi dengan kelompok masyarakat sipil. Selain mendatangi Kantor

PBNU, Presiden juga mendatangi Kantor PP Muhammadiyah, bertemu pimpinan 21 ormas Islam, menerima pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat dan Banten, serta menemui alim ulama di Jawa Tengah.

Presiden Jokowi meminta ulama dan tokoh Islam untuk turut menjaga kesejukan. Presiden juga memastikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama tetap berjalan, seperti diinginkan pengunjung rasa pada 4 November.

Presiden juga menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Basuki. Rabu pekan lalu, Polri menetapkan Basuki sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Peneguhan

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, dalam program bincang-bincang Satu Meja bertema "Safari Politik Elite" di Kompas TV, Senin (21/11) malam, mengatakan, konsolidasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Presiden berupaya melakukan apa yang dalam komunikasi politik disebut peneguhan. "Jadi, peneguhan agenda dan konsensus bersama bangsa," ujarnya

Acara yang dipandu Pemimpin Redaksi *Kompas* Budiman Tanuredjo tersebut juga menghadirkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo sebagai narasumber.

Basarah melihat pertemuan antara Presiden, Wakil Presiden, dan para tokoh bangsa didasari semangat kebangsaan. Silaturahmi dan konsolidasi kebangsaan itu dilakukan dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.

Para elite mencoba menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan politik tidak membuat mereka harus selalu berseberangan dan terpecah belah. Hal inilah yang setidaknya ingin ditunjukkan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selama tiga pekan, Jokowi dan Prabowo sudah dua kali bertemu. Pertama pada 31 Oktober, Jokowi berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedua pada 17 November lalu, Prabowo mengunjungi Jokowi di Istana Merdeka.

Secara terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, melihat Presiden Jokowi ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah tidak

mengabaikan suara umat Islam. Presiden juga ingin menegaskan bahwa tentara dan kepolisian adalah alat negara yang bekerja di bawah perintah Presiden.

Safari elite politik

Konsolidasi politik tidak berhenti setelah Basuki ditetapkan sebagai tersangka. Sehari setelah Polri meningkatkan status kasus Basuki ke tahap penyidikan, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Pada hari yang sama Presiden juga bertemu Prabowo.

Selanjutnya pada hari Senin lalu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri datang untuk makan siang. Ketua Umum PDI-P itu sampai membawakan bakmi goreng untuk disantap bersama Presiden Jokowi.

Pertemuan dengan para pemimpin parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berlanjut hingga Selasa kemarin. Selain sarapan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jokowi juga bertemu Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Konsolidasi politik tidak hanya terjadi antara presiden dan pimpinan parpol pendukung, tetapi juga antarpetinggi partai pendukung pemerintah. Kamis lalu, Paloh menemui Novanto di kantor DPP Partai Golkar, Slipi. Kemudian pada hari Minggu, Novanto menemui Megawati di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Kemarin, giliran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Megawati.

Manuver para elite politik beberapa hari terakhir, menimbulkan banyak tanya. Apakah para elite bertemu karena situasi negara benar-benar genting atau mereka bertemu hanya untuk membahas konsensus politik tertentu? Apalagi pertemuan dilakukan setelah adanya informasi upaya makar yang disampaikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, serta penetapan Novanto sebagai Ketua DPR oleh DPP Partai Golkar.

Wajar saja jika safari para elite politik itu memunculkan banyak spekulasi. Ini karena meminjam diktom ilmuwan politik yang juga pencetus teori komunikasi asal Amerika Serikat, Harold Laswell, politik itu tentang siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana.

Namun, konsolidasi ini menyadarkan kepada semua pihak bahwa kebinekaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Jika Presiden tidak bisa mengelola ketegangan akibat persoalan agama atau budaya, kasus-kasus seperti dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki bisa terus menjadi batu ganjalan dalam perjalanan pemerintahannya. (ANITA YOSSIHARA/ANDY RIZA HIDAYAT)

Polri Limpahkan Berkas Basuki Jumat Besok

Buni Yani Ditetapkan sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI memastikan bakal melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama ke Kejaksaan Agung pada Jumat (25/11).

Secara terpisah, Rabu (23/11) malam, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus pencemaran nama dan penghasutan. Ia dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, proses penyidikan dalam kasus dugaan penistaan agama sudah berjalan 70 persen, terutama setelah pemeriksaan Basuki sebagai tersangka pada Selasa lalu dan pemeriksaan saksi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab, kemarin.

Hari ini, Kamis, penyidik Bareskrim berencana menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli yang diajukan Basuki dan juga 14 pelapor.

”Jumat akan kami limpahkan ke kejaksaan. Selama proses penyidikan, kami telah berkoordinasi dengan Kejagung sehingga kami berharap berkas penyidikan langsung dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa,” kata Ari di Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin.

Selama proses penyidikan yang telah berlangsung dalam satu pekan ini, penyidik Bareskrim telah memeriksa 27 orang.

Saat diperiksa sebagai ahli agama yang diajukan para pelapor, Rizieq mengatakan dirinya menyampaikan sejumlah barang bukti baru kepada penyidik terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki. Barang bukti itu adalah buku yang ditulis oleh Tim Ahok-Djarot, kemudian ada pula rekaman pernyataan Basuki di sejumlah tempat yang memiliki konten serupa dengan kejadian di Kepulauan Seribu 27 September lalu.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar tiga jam itu, Rizieq mengaku hanya melengkapi keterangannya saat diperiksa pada tahap penyelidikan. Rizieq juga telah secara resmi menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP).

Empat alat bukti

Di Polda Metro Jaya, penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal, kemarin, memeriksa Buni Yani selama lebih kurang delapan jam. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 11.00, status Buni Yani kemudian ditingkatkan menjadi tersangka pada pukul 20.00.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, penyidik mendapati adanya bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status Buni Yani.

Penyidik telah mendapatkan empat dari lima alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

”Yang jadi masalah pidana bukan mengunggah video, tetapi menuliskan tiga paragraf di akun Facebook miliknya. Tiga paragraf itu, berdasarkan keterangan saksi ahli, yang meyakinkan penyidik bahwa BY (Buni Yani) melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU ITE,” kata Awi.

Buni Yani adalah pihak yang mengunggah video pidato Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu di jejaring sosial Facebook. Adapun tiga paragraf yang dimaksud, antara lain, berisi pernyataan Basuki yang diduga dikutip secara tidak lengkap.

Awi menambahkan, video yang diunggah Buni Yani adalah video asli, tetapi sudah dipotong. Video asli sepanjang 1 jam 40 menit yang kemudian dipotong menjadi 30 detik dari menit 00.24.16 sampai dengan 00.24.46.

Mengenai apakah penahanan akan dilakukan atau tidak terhadap Buni Yani, Awi mengatakan, hal itu baru akan diputuskan Kamis (24/11) ini atau 1 x 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka.(WAD/SAN)

DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Berkas Perkara Basuki Dilimpahkan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS— Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Jumat (25/11) ini, dijadwalkan melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama kepada Kejaksaan Agung. Meskipun diserahkan, Bareskrim Polri akan tetap berkoordinasi dengan Kejagung agar proses penuntutan kasus tersebut tetap bisa dipercepat.

Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Komisaris Besar Agus Kurniady Sutisna, di Jakarta, menyatakan, penyidik Bareskrim telah menyusun resume berkas perkara kasus dugaan penistaan agama. Penyusunan resume dilakukan karena penyidik tinggal melengkapi keterangan ahli dan saksi dari 14 pelapor. Dalam proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama, Bareskrim telah memeriksa 30 orang, termasuk Basuki.

”Kami pastikan, pekan ini, berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dilimpahkan. Karena tahap pertama, kami akan cermati proses penelitian berkasnya agar jika ada kekurangan, kami dapat melengkapinya” kata Agus.

Sejauh ini, Agus meyakini proses pemberkasan kasus tersebut sudah berjalan baik. Selain telah memeriksa sejumlah saksi, ahli, hingga tersangka, Polri juga memeriksa barang bukti dan melakukan gelar perkara. Bahkan, dalam prosesnya, penyidik juga telah berkoordinasi dengan tim jaksa peneliti Kejagung yang dibentuk Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sebelumnya, Prasetyo mengatakan, pihaknya menunggu pelimpahan kasus tersebut agar cepat dapat diteliti dan disiapkan proses penuntutannya (*Kompas*, 22/11).

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menambahkan, penanganan kasus Basuki sudah hampir selesai 100 persen. Pemeriksaan saksi dan ahli dari pelapor hanya untuk melengkapi kekurangan dalam proses penyidikan. Penyidik kepolisian akan serius dan segera menyelesaikan proses penyidikan kasus itu.

”Setelah berkas dinyatakan P-21 atau lengkap oleh jaksa, kami akan segera menyerahkan alat bukti dan tersangkanya ke Kejagung,” kata Boy.

Basuki sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Tak pilih kasih

Terkait penetapan tersangka terhadap Buni Yani, yang diduga menghasut karena di antaranya menuliskan tiga paragraf pernyataan Basuki secara tidak lengkap, Boy menegaskan, Polri tidak pilih kasih.

”Tidak ada tebang pilih. Proses hukum dua kasus tersebut didasari pada pertimbangan penyidik dengan menaati sejumlah peraturan yang berlaku,” ujarnya.(SAN)

WAWANCARA PRABOWO SUBIANTO

Demokrasi Tetap Jalan Terbaik

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, kemajuan bangsa Indonesia di masa depan hanya bisa diraih jika sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Prabowo menilai demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dan sudah teruji di banyak negara.

Untuk itu, menurut Prabowo dalam wawancara khusus dengan harian *Kompas* dan Kompas TV di kediamannya, di Jakarta, Senin (28/11) malam, jangan sampai elite politik merusak sistem demokrasi. Saluran kritik rakyat terhadap elite politik dan penguasa negeri tetap harus dibuka untuk menjamin demokrasi tetap terjaga.

Dinamika politik yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, menurut Prabowo, menjadi salah satu ujian bagi semua komponen bangsa untuk tetap memegang teguh demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Prabowo menilai kudeta atau upaya pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang sah dan terpilih melalui pemilu yang demokratis akan selalu berujung pada krisis legitimasi, apalagi kudeta di Indonesia tak pernah berhasil.

"Tadi saya jawab bahwa risikonya, kalau pengambilalihan (kekuasaan) bisa saja di mana-mana terjadi, tetapi legitimasinya yang menjadi masalah. Kebetulan sampai sekarang di Indonesia tidak pernah berhasil," ujarnya.

Prabowo mengatakan, demokrasi dan Pancasila sebenarnya mengajarkan bangsa Indonesia bahwa semua persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan musyawarah dan saling mengerti. "Saya selalu mengajak, mari kita selesaikan dengan sistem terbaik, yang sudah diuji di dunia, yang terbaik itu adalah demokrasi. Selesaikan melalui pemilihan. Kita juga punya budaya Pancasila, jangan jadi mantra di mulut. Semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Saya kira kalau dengan musyawarah, kita saling mengerti. Jangan permusuhan kita ciptakan atau kita teruskan. Itu, kan, enggak perlu. Enggak baik. Kecurigaan kita selesaikan dengan kebaikan," katanya.

Perbedaan tajam di antara elite politik karena kontestasi yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah tidak seharusnya mengarah pada perpecahan bangsa.

"Saya prihatin, di sinilah demokrasi kita harus kita jaga benar-benar. Ini memang kadang-kadang banyak pemimpin politik memikirkan kepentingan pribadi, jadi dia berbuat tidak melihat dampak kepada rakyat. Itu yang saya khawatir," ujar Prabowo.

Secara khusus Prabowo mengapresiasi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan upayanya meredakan ketegangan politik di Tanah Air. Prabowo mengatakan, dirinya memang memberi masukan kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. "Saya memberi masukan-masukan dan saya lihat bagaimanapun ketegangan harus kita redakan. Suatu keadaan yang tegang merugikan semua pihak," ujarnya.

Prabowo juga memuji langkah yang dilakukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang menggelar pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ulama yang menggagas demonstrasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. "Alhamdulillah, pertemuan tokoh-tokoh (inisiator unjuk rasa) 2 Desember dengan Kapolri ternyata membuahkan kesadaran yang baik. Kita berharap 2 Desember nanti sejuk," katanya.

Dewasa dan arif

Menurut Prabowo, elite politik dan semua pemimpin di Indonesia harus mulai dewasa dan arif. Pemimpin juga harus bertindak hati-hati agar rakyat tidak dirugikan di kemudian hari. Demokrasi mengajarkan bahwa semua persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Prabowo mengatakan, ada kepentingan bangsa yang lebih besar dan harus dijaga.

"Saya mengajak semua pihak untuk damai, sejuk, arif, dewasa, dan sabar. Menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan dengan memikirkan kepentingan yang besar bahwa kita harus jaga ketenteraman dan kedamaian. Itu keyakinan saya. Kalau pemimpin tidak hati-hati, yang rugi banyak orang, banyak pihak. Kita semua rugi, bangsa kita akan rugi," ujar Prabowo.

Upaya yang sama untuk menciptakan kedamaian juga dilakukan Prabowo yang mengaku selama dua pekan terakhir menggelar pertemuan dengan sejumlah

tokoh. "Saya dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, selama dua minggu ini, selalu mengajak mereka seperti itu. Jadi, kita boleh merasa benar, tapi kita juga harus memikirkan semua dampak, ucapan dan sikap kita masing-masing," katanya.

Prabowo mengungkapkan, pelajaran yang dapat diambil dari dinamika politik yang cukup menegangkan selama beberapa hari terakhir adalah

pemimpin harus menjaga amanah yang diberikan kepada rakyat. "Ini, kan, tergantung kita, tergantung pemimpin. Kita harus mendidik yang baik, bertindak yang baik. Kita harus menjaga integritas. Jangan undang-undang yang kita hasilkan hanya menguntungkan pihak-pihak yang punya uang. Jangan rakyat kecil tidak dianggap," kata Prabowo. (NMP/BIL)

39. KOMPAS(Nasional) - Selasa, 29 Nov 2016 Halaman: 02

Ada Masalah Kebangsaan

Semua Kebutuhan Peserta Aksi Disiapkan di Kawasan Silang Monas

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan ada masalah terkait persoalan kebangsaan. Oleh karena itu, konsolidasi politik dan kebangsaan akan terus dilakukan untuk mengingatkan semua komponen bangsa dan memperkuat kesatuan dalam keberagaman.

"(Konsolidasi) terus tak ada habisnya. Sekali lagi, terus tak ada habisnya dan tak akan ada habisnya. Kita semuanya harus menyadari bahwa keberagaman ini perlu digandeng-gandengkan. Agar kita tetap satu. Jangan kita melupakan itu," ujar Presiden Jokowi se usai meninjau pelaksanaan program dana desa di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11).

Presiden mengingatkan, semua komponen bangsa patut merawat kebangsaan demi mengatasi tantangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

Sementara di Jakarta, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan jajarannya bertemu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dengan sejumlah ulama di gedung MUI.

Dari hasil pertemuan yang diselengi makan siang bersama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI sepakat mengalihkan aksi damai dari semula direncanakan di Bundaran Hotel Indonesia ke kawasan Silang Monumen Nasional pada Jumat (2/12) sejak pukul 08.00 hingga 13.00. Aksi damai itu akan diisi kegiatan zikir, tausiah, dan ditutup shalat Jumat berjemaah dengan Ma'ruf sebagai khatib.

"Kami mengapresiasi pengertian GNPF MUI yang memilih Lapangan Monas. Kami pun siap berkoordinasi untuk memastikan agenda keagamaan ini bisa berlangsung baik, lancar, dan aman," kata

Kapolri didampingi Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar. Tito menjelaskan, lapangan Silang Monas mampu menampung 700.000 orang dan jika belum memadai, polisi menyiapkan Jalan Medan Merdeka Barat.

Tim terpadu

Polri bersama Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, dan anggota keamanan organisasi kemasyarakatan membentuk tim terpadu mengamankan aksi. Mereka juga menyiapkan kebutuhan perlengkapan aksi mulai penentuan arah kiblat, panggung zikir, air bersih, hingga mengamankan jalur kepulauan massa.

Terkait aksi damai itu, Ketua Dewan Pembina GNPF Rizieq Shihab memastikan akan menyambut kedatangan dan mengiringi kepulauan para peserta aksi sehingga komitmen bersama aksi damai tetap terjaga. Rizieq juga meminta Polri memproses hukum sejumlah pihak yang melakukan aksi di luar kesepakatan bersama tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir meminta para peserta aksi tidak membawa senjata tajam dan bambu runcing. "Bagi yang tidak bisa ke Jakarta, silakan datang ke masjid untuk istigah bersama," kata Bachtiar.

Di Semarang, Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Darodji menyampaikan, warga lebih baik menunggu proses hukum yang tengah berjalan. "Tuntutan sudah dipenuhi dan sedang diproses. Mari tunggu saja. Insya Allah proses akan berjalan terus," kata Darodji, di Semarang, Senin. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Bambang Waskito mengatakan, pihaknya

tetap mengamankan aksi. Namun, peserta aksi wajib melapor dan menjaga ketertiban. "Tidak perlu ke Jakarta," ujarnya.

Proses hukum

Berkaitan dengan desakan agar Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dugaan penistaan agama segera ditahan, Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana, mengatakan, semua pihak harus menunggu proses hukum berjalan.

Kapolri pun memastikan, penyidik Reserse Kriminal Umum Badan Reserse Kriminal Polri tetap menjalin komunikasi dengan Kejaksaan Agung agar ketika berkas lengkap dapat segera melimpahkan berkas.

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad menuturkan, tim jaksa mulai meneliti berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki yang ditargetkan selesai pekan ini. "Kami berharap sejumlah pihak bersabar. Tim jaksa tengah meneliti secara cermat berkas perkara yang kami terima Jumat lalu," katanya. (SAN/NDY/DIT/IKI/DIM/RWN/SEM/HAR)

40.KOMPAS(Nasional) - Rabu, 30 Nov 2016 Halaman: 02

Hormati Kesepakatan

Dunia Usaha Berharap Aksi 2 Desember Berlangsung Damai

PADANG, KOMPAS — Kesepakatan Kepolisian Republik Indonesia dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk menghadirkan suasana damai pada aksi 2 Desember mendatang diharapkan bisa dipatuhi dan diwujudkan bersama.

"Kami berharap itu (kesepakatan) adalah capaian yang baik. Semoga kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Dengan begitu, aksi nanti betul-betul damai yakni diisi dengan zikir, doa-doa, lalu shalat Jumat bersama seperti yang direncanakan. Saya berharap tidak ada hal-hal negatif yang bisa merugikan kita semua," harap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (29/11), di Padang, Sumatera Barat.

Sebelumnya, Polri dan GNPF MUI juga sepakat bahwa aksi 2 Desember itu akan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 13.00 di kawasan Silang Monas.

Terkait aksi itu, kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan, yang terjadi pada 2 Desember itu adalah doa bersama. "Enggak ada demonstrasi," kata Presiden Jokowi seusai memimpin upacara HUT Ke-45 Korpri di Jakarta.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, kalangan dunia usaha menghargai rencana aksi pada 2 Desember mendatang. Kegiatan itu diharapkan berjalan tertib dan sesuai aturan.

Rosan mengatakan, setelah unjuk rasa 4 November 2016 terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja

Purnama, pihaknya menemui pimpinan sejumlah perusahaan besar, baik dalam negeri maupun internasional. "Mereka melihat investasi sebagai kegiatan jangka panjang. Mereka tetap berminat investasi, berekspansi, dan berencana sesuai pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani berharap, aksi 2 Desember mendatang tidak memasuki wilayah yang mengganggu kegiatan ekonomi dan memundurkan sistem demokrasi.

Pengamanan

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar RP Argo Yuwono mengatakan, pada 2 Desember mendatang pihaknya tidak saja mengamankan peserta unjuk rasa yang berasal dari Jakarta, tetapi juga menjemput mereka ketika masuk tol untuk selanjutnya diarahkan ke sekitar Masjid Istiqlal.

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, dalam pernyataan resminya, meminta aparat penegak hukum lebih mengedepankan kewajiban mengayomi dan melindungi keselamatan warganya dan menjamin hak-hak konstitusional warganya berjalan dengan sebaik-baiknya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga akan menggelar aksi pada 2 Desember. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi KSPI terpisah dengan GNPF MUI. Namun, ia tidak memungkiri ada irisan isu yang sama terkait kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama.

Isu-isu yang menarik perhatian KSPI di antaranya adalah upah murah buruh, kerusakan lingkungan akibat kebijakan reklamasi, dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Kejaksaan Agung terus menyelesaikan penelitian berkas perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki. Ketua Tim Jaksa Peneliti Kasus Basuki Ali Mukartono mengatakan, pihaknya baru bisa memastikan bahwa Basuki masih dijerat dengan Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni mengenai penistaan atau penodaan

agama. "Belum ada pasal baru yang menjerat Basuki," ujarnya.

Ali menyatakan, akan secepatnya menyelesaikan penelitian terhadap berkas perkara Basuki.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengutarakan, pihaknya selalu siap membantu penyelesaian penelitian berkas kasus Basuki.

(SON/LKT/CAS/WER/SYA/INA/PRA/DEA/ZAK)